

**ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI  
PADA SATUAN KERJA  
POLRES SIBOLGA**

**TESIS**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen (MM)  
Dalam Bidang Ilmu Manajemen*

**Oleh :**

**LILY FACHRIZAL BATUBARA**  
NPM : 1820030079



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PERSETUJUAN TESIS**

Nama : **LILY FACHRIZAL BATUBARA**  
NPM : **1820030079**  
Program Studi : **Magister Manajemen**  
Judul Tesis : **ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PADA  
SATUAN KERJA POLRES SIBOLGA**



**Pengesahan Tesis**

Medan, Rabu 3 Maret 2021

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Drs. SJAHRIL EFFENDY P., M.Si., MA., M.Psi., MH.

Assoc. Prof. H. MUIS FAUZI RAMBE, S.E., M.M.

**Diketahui**

Direktur

Ketua  
Program Studi

**Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP**

Assoc. Prof. Dr. Drs. SJAHRIL EFFENDY P., M.Si., MA., M.Psi., MH.

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PADA SATUAN KERJA  
POLRES SIBOLGA**

**LILY FACHRIZAL BATUBARA**

**NPM : 1820030079**

Program Studi : Magister Manajemen

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Manajemen (M.M) Pada Hari Rabu, Tanggal 03 Maret 2021”

*Panitia Penguji*

1. Assoc. Prof. Dr. Drs. SJAHRIL EFFENDY P., M.Si., MA., M.Psi., MH.  
Ketua

1. ....

2. Assoc. Prof. H. MUIS FAUZI RAMBE, S.E., M.M  
Sekretaris

2. ....

3. Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP  
Anggota

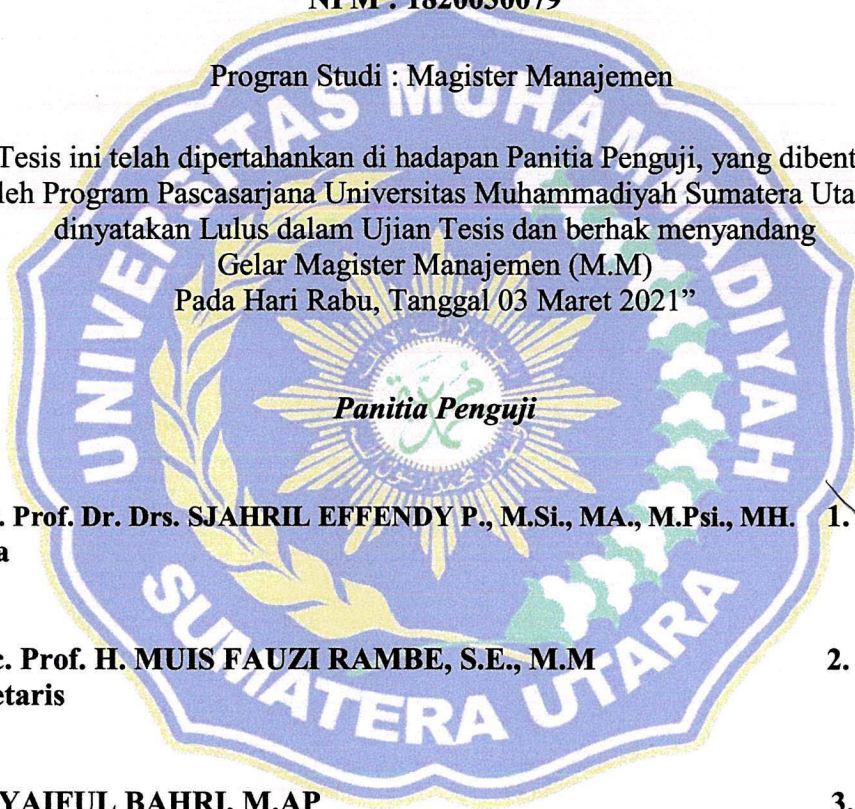
3. ....

4. Dr. HAZMANAN KHAIR. S.E., M.BA.  
Anggota

4. ....

5. Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.  
Anggota

5. ....



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Handwritten signatures and initials next to the list of examiners, including a signature for the Chairman (1) and others for members 2, 3, 4, and 5.



## PERNYATAAN

### ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PADA SATUAN KERJA POLRES SIBOLGA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelas akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sank-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Medan, Maret 2021

Penulis



**LILY FACHRIZAL BATUBARA**  
NPM : 1820030079

## ABSTRAK

Realisasi Anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Polres Sibolga didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Organisasi dan Tata Kerja Entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP/071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. identitas berkedudukan di Jalan FL. Tobing No. 35 Kota Sibolga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya minus anggaran belanja pada Satuan Kerja Polres Sibolga dan mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak minus anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga periode tahun 2015, 2016, 2017, 2019.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan bahan primer dan sekunder dengan mengumpulkan dan menganalisis data hasil wawancara dan observasi di Satuan Kerja Polres Sibolga dan studi kepustakaan (*field research*).

Realisasi anggaran sebaiknya berjalan sesuai dengan yang dianggarkan pada setiap periode pada satuan kerja Polres Sibolga. Namun, pada empat tahun belakangan yakni tahun 2015, 2016, 2017, dan 2019 terjadi ketidakstabilan anggaran. Ketidakstabilan anggaran tersebut karena faktor minus anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga. Upaya penanggulangan agar tidak terjadi minus anggaran maka dilakukan revisi anggaran dalam pagu tetap revisi anggaran dalam pagu berubah dan revisi administratif.

**Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Laporan Anggaran, Satuan Kerja Polres Sibolga**

## **ABSTRACT**

*Budget Realization is all budget execution activities which also include analysis and evaluation of budget implementation activities. Sibolga Police Station was established as one of the government's efforts to improve the quality of the State Ministry / Institution's Financial Statements. The Organization and Working Procedure of Entities are governed by the Accounting and Financial Reporting Agency Regulation No. 2005 / BALAP / 071/2012 concerning Organization and Work Procedures of the Vertical Agency for Accounting and Financial Reporting. The entity is domiciled in Jalan FL. Tobing No. 35 Sibolga City.*

*This study aims to determine and analyze the factors causing the occurrence of a budget reduction in the Sibolga Regional Police Work Unit and to know and analyze prevention and prevention efforts so as not to reduce the budget in the Sibolga Regional Police Unit in the 2016-2015 period 2016-2020.*

*This research method uses a qualitative approach using descriptive analysis. Data collection techniques using primary and secondary material by collecting and analyzing data from interviews and observations at the Sibolga Regional Police Unit and library research (field research).*

*Budget realization should run according to what is budgeted for in each period at the Sibolga Police work unit. However, in the last four years, namely 2015, 2016, 2017, and 2019 there was budget instability. The instability of the budget is due to the minus factor in the personnel expenditure budget for the Sibolga Police Work Unit. Countermeasures so that there is no minus budget, a budget revision is made in the fixed ceiling, the budget revision in the changing ceiling and administrative revisions are made.*

**Keywords: Budget Realization, Budget Report, Sibolga Regional Police Unit**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas Rahmat Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Analisis Anggaran dan Realisasi Pada Satuan Kerja Polres Sibolga”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Terkhusus kepada yang tercinta dan yang saya banggakan H. Fachruddin Batubara dan Ibunda Hj. Nurlela Haniah Naipospos yang telah banyak berkorban dalam mengasuh, mendidik, mendukung dan mendoakan. Terima kasih banyak atas kasih sayang dan motivasi yang selalu diberikan hingga detik ini untuk menjalani segala kehidupan dengan tulus ikhlas. Istriku tercinta Rike Key Lani S.Pd yang paling memahami pembelajaranku di pasca sarjana selama dua tahun, anak-anakku tersayang, Danish Bazlin Batubara, Fildzah Bahiyah Batubara, Salim Baithar Batubara dan Felisya Behnaz Batubara yang selalu sabar menunggu di rumah. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi keluarga. Teristimewa untuk alm. Papa H. Rivai Yamin S.E dan Mama Hj. Yuhibah yang selalu memberikan doa. Tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Sjahril Effendi P.,M.Si.,M. Psi.,M.H selaku Ketua Program Studi Manajemen sekaligus Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan proposal ini.
4. Bapak Assoc. Prof. H. Muis Fauzi Rambe, S.E.,M.M, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan proposal ini.
5. Bapak Dr. Syaiful Bahri,M.Ap selaku Penguji I yang telah banyak memberikan nasehat.
6. Bapak Dr. Hasmanan Khair,SE.,M.BA selaku Penguji II yang telah membantu penyusunan tesis ini.
7. Ibu Dr. Leylia Khairani,M.Si selaku Penguji III yang mana selalu membantu dalam setiap perbaikan tesis ini
8. AKBP Triyadi S.H.,SIK selaku Kapolres Sibolga yang telah memberikan fasilitas dalam menjalani studi dan penulisan tesis penulis. AKBP Edwin H. Hariandja. SIK., M.H selaku wakil direktur Intelkam Polda Metro Jaya yang telah mendukung penulis untuk berjuang di Prodi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Adik-adikku tercinta Fahri Batubara, Amd dan Maisarah Batubara, S.Pd yang selalu berdoa memberikan dukungan yang tak pernah ada habisnya.
10. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang



membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan,       Maret 2021

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Masalah.....	14
1.3 Batasan Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah .....	15
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Landasan Teori .....	18
2.1.1 Perencanaan Dan Penganggaran.....	18
2.1.1.1 Prosedur Anggaran dari APBN.....	21
2.1.1.2 Tujuan Dan Manfaat Anggaran .....	29
2.1.1.3 Faktor-Faktor Anggaran.....	37
2.1.1.4 Syarat Menyusun Anggaran.....	40
2.1.2 Realisasi Anggaran .....	41
2.1.3 Tujuan Dan Manfaat Realisasi Anggaran .....	42
2.1.4 Kajian Penelitian Yang Relevan .....	50
2.3 Kerangka Berfikir/Konseptual.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	59
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	59
3.3 Sumber Data Penelitian .....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.5 Analisis Data.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
4.1 Deskripsi Data Penelitian .....	67
4.1.1 Deskripsi Anggaran .....	67
4.1.2 Deskripsi Realisasi Anggaran.....	68
4.2 Temuan Penelitian .....	68
4.2.1 Analisis Perbandingan dan Realisasi Anggaran di Polres Sibolga Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 .....	69
4.2.2. Kesenjangan Antara Realisasi dan Anggaran.....	87
4.2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Anggaran.....	89
4.3 Pembahasan .....	90
4.3.1 Kesenjangan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Satuan Kerja Polres Sibolga .....	90

4.3.2 Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kesenjangan .....	99
4.3.3 Alur Pelaksanaan Realisasi Anggaran di Satuan Kerja Polres . Sibolga .....	101
4.4 Rangkuman Pembahasan .....	105
<b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>	<b>107</b>
5.1 Simpulan .....	107
5.2 Implikasi .....	108
5.3 Saran .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tebel 1.1 Anggaran Polres Sibolga Tahun 2015-2019 .....	11
Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Polres Sibolga Tahun 2015-2019.....	12
Tabel 1.3 Selisih Anggaran & Realisasi Polres Sibolga Tahun 2015-2019..	12
Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan .....	49
Tebel 3.2 Pelaksanaan Waktu Peneltian .....	63
Tabel 4.1 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2015 .....	73
Tabel 4.2 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Barang Polres Sibolga Tahun 2015 .....	75
Tabel 4.3 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2016.....	77
Tabel 4.4 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Barang Polres Sibolga Tahun 2016 .....	79
Tabel 4.5 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2017 .....	80
Tabel 4.6 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Barang Polres Sibolga Tahun 2017 .....	84
Tabel 4.7 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2018 .....	85
Tabel 4.8 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Barang Polres Sibolga Tahun 2018 .....	87
Tabel 4.9 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2019.....	88
Tabel 4.10 Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Modal Polres Sibolga Tahun 2019.....	89
Tabel 4.11 Selisih Anggaran dan Realisasi Pada Pagu Polres Sibolga (dalam Rupiah) Pada Tahun 2015-2019.....	84
Tabel 4.12 Perkembangan Minus dan Surplus Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015-2019 di Polres Sibolga .....	96
Tabel 4.13 Perkembangan Surplus Belanja Barang di Polres Sibolga Tahun Anggaran 2015-2019.....	98
Tabel 4.14 Perkembangan Surplus Belanja Modal Polres Sibolga Tahun Anggaran 2015-2019.....	99

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Siklus APBN .....	28
Gambar 1.2 Alur Penyusunan DIPA Anggaran .....	29
Gambar 1.3 Acuan Penyusunan dan Prosedur Anggaran .....	40
Gambar 1.4 Alur Anggaran Kepolisian RI .....	41
Gambar 1.5 SOP LRA Polres Sibolga .....	44
Gambar 1.6 Acuan dan Prosedur Menyusun LRA.....	48
Gambar 1.7 Kerangka Konseptual/Berfikir .....	60
Gambar 4.1 Alur LRA Pagu Polres Sibolga .....	106



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Polres sebagai unsur pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang- undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (Ayat 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (Ayat 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik (Malayu Hasibuan, 2007)).

Fungsi-fungsi manajemen seringkali diartikan sebagai tugas-tugas manajer. Beberapa klarifikasi fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry yang diterjemahkan oleh Malayu S.P Hasibuan (2012) adalah *planning* (Perencanaan) berarti menentukan program kerja yang akan membantu terciptanya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan, *organizing* (Pengorganisasi) setelah rangkaian tindakan, perlu disusun organisasi untuk melaksanakannya. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. *Actuating* (Penggerakan) yaitu fungsi yang menggerakan orang-orang termasuk sarana

manajemen lainnya kearah tercapainya tujuan yang ditetapkan perusahaan, mengusahakan orang-orang mau berkerja sama dengan efektif, *Controlling* (Pengawasan) yaitu fungsi ini berhubungan dengan pengawasan aktivitas-aktivitas perusahaan agar sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah ditentukan.

Menurut (Munandar, 2011) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode yang akan datang. Anggaran menurut (Suharsimi, 2010) yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa (Nafarin, 2013).

Menurut (Mahsun, 2010) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang, yang mencakup jangka waktu tertentu (pada umumnya satu tahun) dan dinyatakan dalam satuan moneter. Perencanaan ini berkaitan dengan terselenggaranya kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial untuk dapat mengukur kebutuhan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dari defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang

dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk periode yang akan datang.

Realisasi Anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan budget. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode- periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Menurut (Prasetyo, 2010) dalam bukunya yang berjudul Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Polres Sibolga didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Organisasi dan Tata Kerja Entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP/071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan FL. Tobing No. 35 Kota Sibolga.

Laporan realisasi anggaran (LRA) anggaran belanja Polres Sibolga periode anggaran 2011-2019 dapat dilihat pada tabel berikut : (Kabagren Polres Sibolga, 2020):

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Belanja T.A 2015

File Terlampir

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	44.270.000	5.393.793	12,16	38.876.207
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	2.000	0	0,0	2.000
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	4.426.000	0	0,00	4.426.000
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1.771.000	0	0,00	1.771.000
	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	6.370.000	0	0,00	6.370.000
	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	2.057.000	0	0,00	2.057.000
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2.171.000	0	0,00	2.171.000
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	7.920.000	0	0,00	7.920.000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	11.826.000	0	0,00	11.826.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>60.815.000</b>	<b>5.393.793</b>	<b>6,67</b>	<b>75.421.207</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/Polri	4.696.615.000	7.979.336.500	169,62	-3.269.523.500
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri	137.000	164.907	120,37	-27.907
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri	443.022.000	567.656.319	128,16	-124.636.319
	Belanja Tunj. Anak TNI/Polri	157.154.000	176.104.062	113,33	-20.950.062
	Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri	373.230.000	566.600.000	152,11	-213.370.000
	Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	239.601.000	355.675.266	148,85	-115.074.266
	Belanja Tunj. Beras TNI/Polri	616.610.000	696.715.040	112,83	-76.105.040
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri	3.436.000.000	4.122.055.000	119,96	-684.055.000
	Belanja Tunj. Kawan/Potwan TNI/Polri	1.300.000	5.000.000	384,62	-4.500.000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/Polri	22.100.000	0	0,00	22.100.000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/Polri	14.690.000	0	0,00	14.690.000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/Polri	10.252.000	0	0,00	10.252.000
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	132.600.000	136.650.000	103,05	-4.050.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112</b>	<b>10.149.711.000</b>	<b>14.626.961.090</b>	<b>144,13</b>	<b>-4.479.250.090</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>16.230.526.000</b>	<b>14.634.354.683</b>	<b>143,05</b>	<b>-4.403.626.663</b>
52	<b>BELANJA BARANG</b>				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran	303.200.000	303.200.000	100,00	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>303.200.000</b>	<b>303.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	Belanja Barang Non Operasional				
	Belanja Honor Output Kegiatan (Honor Operator RKAWL)	7.200.000	6.900.000	95,83	300.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>95,83</b>	<b>300.000</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	421.970.000	421.970.000	100,00	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>421.970.000</b>	<b>421.970.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
	Belanja Perjalanan Dinas	61.000.000	60.985.000	99,98	15.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>61.000.000</b>	<b>60.985.000</b>	<b>99,98</b>	<b>15.000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>813.370.000</b>	<b>813.055.000</b>	<b>99,96</b>	<b>315.000</b>
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (MT-56 / HSD)	576.700.000	576.562.500	99,98	117.500
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>576.700.000</b>	<b>576.562.500</b>	<b>99,98</b>	<b>117.500</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	144.000.000	144.000.000	100,00	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>144.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>720.700.000</b>	<b>720.562.500</b>	<b>99,98</b>	<b>117.500</b>
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Barang Operasional Lainnya	24.000.000	24.000.000	100,00	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>



Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Lainnya (Penindakan Tindak Tiplakor)	85.818.000	85.818.000	100,00	0
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>85.818.000</b>	<b>85.818.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>85.818.000</b>	<b>85.818.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Lainnya (Pengadaan BMF (PNBP))	264.250.000	250.104.500	94,65	14.145.500
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>264.250.000</b>	<b>250.104.500</b>	<b>94,65</b>	<b>14.145.500</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>264.250.000</b>	<b>250.104.500</b>	<b>94,65</b>	<b>14.145.500</b>
Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran	7.500.000	7.500.000	100,00	0
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7.800.000	7.800.000	100,00	0
Belanja Barang Operasional Lainnya (Pulsa PDA SKCK Polsek)	43.720.000	43.120.000	98,63	600.000
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>59.020.000</b>	<b>58.420.000</b>	<b>98,98</b>	<b>600.000</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>59.020.000</b>	<b>58.420.000</b>	<b>98,98</b>	<b>600.000</b>
Belanja Barang Operasional Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (Honor Operator Dana Iaku Lintas)	7.200.000	0	0,00	7.200.000
Belanja Barang Operasional Lainnya (Pulsa Ops tabel Kanselmas di Bid Lintas)	117.800.000	116.800.000	99,32	600.000
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>124.800.000</b>	<b>116.800.000</b>	<b>93,59</b>	<b>8.000.000</b>
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.600.000	24.600.000	100,00	0
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>24.600.000</b>	<b>24.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>24.600.000</b>	<b>24.600.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Satpas P1)	41.361.000	34.375.000	83,11	6.986.000
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>41.361.000</b>	<b>34.375.000</b>	<b>83,11</b>	<b>6.986.000</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>41.361.000</b>	<b>34.375.000</b>	<b>84,65</b>	<b>6.986.000</b>
Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran	4.200.000	4.200.000	100,00	0
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (Honor Pelaksanan SIM dan SAMSAT)	104.790.000	85.790.000	81,87	19.000.000
Belanja Barang Operasional Lainnya (Graf Pam Obvif)	643.297.000	635.293.000	98,76	8.004.000
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>752.287.000</b>	<b>725.283.000</b>	<b>96,41</b>	<b>27.004.000</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>752.287.000</b>	<b>725.283.000</b>	<b>96,41</b>	<b>27.004.000</b>
Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Lainnya	1.993.473.000	1.993.473.000	100,00	0
<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>1.993.473.000</b>	<b>1.993.473.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1.993.473.000</b>	<b>1.993.473.000</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH BELANJA BARANG 52</b>	<b>7.631.191.000</b>	<b>7.515.313.000</b>	<b>98,48</b>	<b>115.878.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17.861.717.000</b>	<b>22.149.667.883</b>	<b>98,91</b>	<b>-4.287.950.883</b>

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja T.A 2016

File Terlampir

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNi/Polri	37.207.000	37.206.950	100	40
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNi/Polri	3.000	474	15,8	2.526
	Belanja Tunj. Suasmita PNS TNi/Polri	3.544.000	3.543.520	99,99	480
	Belanja Tunj. Bersas PNS TNi/Polri	2.608.000	2.607.520	99,97	480
	Belanja Uang Makan PNS TNi/Polri	7.920.000	4.110.000	51,89	3.810.000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNi/Polri	3.601.000	3.600.000	99,97	1.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>54.883.000</b>	<b>51.066.074</b>	<b>93,05</b>	<b>3.814.926</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan TNi/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNi/POLRI	8.326.019.000	8.295.394.350	106,32	-296.475.550
	Belanja Pembulatan Gaji TNi/POLRI	178.000	162.458	91,29	15.542
	Belanja Tunj. Suasmita TNi/POLRI	574.481.000	574.066.355	100,08	-414.645
	Belanja Tunj. Anak TNi/POLRI	183.129.000	183.323.008	100,11	-194.008
	Belanja Tunj. Struktural TNi/POLRI	519.091.000	519.580.000	100,09	-489.000
	Belanja Tunj. PPh TNi/POLRI	229.730.000	229.749.717	100	-19
	Belanja Tunj. Bersas TNi/POLRI	691.328.000	692.152.948	100,12	-824.948
	Belanja Tunj. Lemb. Pak. TNi/POLRI	4.217.051.000	4.221.790.000	100,11	-4.739.000
	Belanja Tunj. Kewas/Poleas TNi/POLRI	3.301.000	3.300.000	99,99	1.000
	Belanja Tunj. Badankamtimas TNi/POLRI	18.701.000	18.700.000	99,99	1.000
	Belanja Tunj. Brawas TNi/POLRI	0	0		0
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNi/POLRI	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum TNi/Polri	152.251.000	152.400.000	100,1	-149.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112</b>	<b>14.914.180.000</b>	<b>13.447.429.056</b>	<b>103,58</b>	<b>-533.249.000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>14.968.063.000</b>	<b>13.469.497.140</b>	<b>103,54</b>	<b>-529.434.140</b>
52	BELANJA BARANG				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran ( ATK 5KCK Poles & Polesak)	11.700.000	8.704.000	100	2.996.000
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	480.310.000	394.470.000	82,13	85.840.000
	Belanja Honor Operasional Selain Kerja	136.280.000	113.170.000	83,04	23.110.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.294.738.000	7.209.823.500	91,32	694.914.500
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>8.523.028.000</b>	<b>7.726.167.500</b>	<b>90,69</b>	<b>796.860.500</b>
	Belanja Barang Non Operasional				
	Belanja Honor Output Kegiatan	7.200.000	7.200.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Barang Persediaan				
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	261.200.000	261.200.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5215</b>	<b>261.200.000</b>	<b>261.200.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	127.449.000	114.672.185	89,97	12.776.815
	Belanja Langganan Telepon	13.546.000	13.211.743	97,53	334.257
	Belanja Langganan Air	22.578.000	22.179.300	98,23	398.700
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>163.573.000</b>	<b>150.063.228</b>	<b>91,74</b>	<b>13.509.772</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	327.200.000	326.776.000	99,87	424.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Selpas P1)	521.331.000	521.322.000	100	9.000
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Persediaan RMD)	2.185.950.000	2.173.275.820	99,43	12.674.180
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>3.034.481.000</b>	<b>3.021.373.820</b>	<b>99,57</b>	<b>13.107.180</b>
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
	Belanja Perjalanan Biasa	44.556.000	44.500.000	99,87	56.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>44.556.000</b>	<b>44.500.000</b>	<b>99,87</b>	<b>56.000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>12.034.036.000</b>	<b>11.210.594.348</b>	<b>93,18</b>	<b>823.441.652</b>
53	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Perdagangan laptop, PC dan printer khusus lainnya)	30.000.000	29.822.727	99,41	177.273
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.822.727</b>	<b>99,41</b>	<b>177.273</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.822.727</b>	<b>99,41</b>	<b>177.273</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27.033.191.000</b>	<b>26.738.824.215</b>	<b>98,91</b>	<b>294.366.785</b>

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja T.A 2017

File Terlampir

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
511101	Belanja Gaji Pokok PNS TNPoR	31.469.000	31.468.980	100	40
511160	Belanja Penjualan Gaji PNS TNPoR	3.000	813	20,43	2.187
511171	Belanja Tunj. Suasana PNS TNPoR	2.319.000	2.918.490	90,96	394
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNPoR	412.000	411.182	99,8	818
511176	Belanja Tunj. Besok PNS TNPoR	2.318.000	2.317.440	90,96	560
511179	Belanja Uang Makan PNS TNPoR	11.500.000	10.560.000	91,83	940.000
511180	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0		0
511183	Belanja Tunjangan Umum PNS TNPoR	2.340.000	2.340.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	50.361.000	50.018.693	98,15	342.307
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNPoR				
511211	Belanja Gaji Pokok TNPoR	7.520.250.000	6.426.875.250	107,69	-608.025.250
511219	Belanja Penjualan Gaji TNPoR	156.000	188.572	108,71	-13.572
511221	Belanja Tunj. Suasana TNPoR	484.625.000	526.579.597	108,7	-41.954.597
511222	Belanja Tunj. Anak TNPoR	152.843.000	172.411.416	108,73	-13.788.416
511223	Belanja Tunj. Struktural TNPoR	427.180.000	482.010.000	112,85	-54.830.000
511225	Belanja Tunj. PPh TNPoR	45.007.000	47.483.513	103,21	-1.476.513
511226	Belanja Tunj. Besok TNPoR	587.109.000	641.895.480	109,26	-54.786.480
511228	Belanja Tunj. Lain-lain TNPoR	3.675.386.000	4.021.950.000	109,47	-346.564.000
511232	Belanja Tunj. Kesenak-Politan TNPoR	9.700.000	10.600.000	109,28	-900.000
511233	Belanja Tunj. Bahkanditama TNPoR	37.800.000	34.700.000	91,8	3.100.000
511236	Belanja Tunj. Bayar TNPoR	13.720.000	0	0	13.720.000
511242	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNPoR	0	0		0
511244	Belanja Tunjangan Umum TNPoR	635.750.000	547.300.000	103,56	-11.850.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	13.380.316.000	14.514.937.805	108,26	-1.116.621.605
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13.447.277.000	14.564.954.499	108,34	-1.117.677.469
52	BELANJA BARANG				
5211	Belanja Barang Operasional				
521111	Belanja Kepentingan Perkantoran	19.000.000	19.090.000	100	0
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Uang makan Non Orngak Pokok dan Pokok)	352.940.000	351.646.000	99,63	1.294.000
521118	Belanja Honor Operasional Selain Kerja	113.320.000	113.320.000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.347.726.000	7.194.936.000	97,82	152.770.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7.832.986.000	7.678.922.000	98,03	154.064.000
5212	Belanja Barang Non Operasional (Honor Sapeyor Jaka Komplek)				
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	18.800.000	14.400.000	72,73	4.400.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18.800.000	14.400.000	72,73	4.400.000
5218	Belanja Barang Perawatan				
521811	Belanja Barang Perawatan Barang Komsumsi	281.200.000	281.200.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	281.200.000	281.200.000	100	0
5221	Belanja Jasa				
522111	Belanja Langganan Listrik	185.110.000	185.798.427	99,92	1.321.573
522112	Belanja Langganan Telepon	13.546.000	13.482.944	99,59	63.056
522113	Belanja Langganan Air	22.578.000	21.641.570	95,85	936.430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	221.234.000	220.922.941	99,89	2.341.059
5231	Belanja Pemeliharaan				
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.200.000	245.200.000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	426.009.000	426.009.000	100	0
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelarasi (BMP) dan	0	0		0
523123	Belanja Barang Perawatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin (Pengadaan BMP Polus-Polusik (Pol Air)	2.344.788.000	2.338.402.000	99,77	6.386.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3.015.977.000	3.010.611.000	99,82	5.366.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
524111	Belanja Perjalanan Dinas	242.295.000	242.295.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	242.295.000	242.295.000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11.893.492.000	11.436.310.241	96,16	457.181.759
53	BELANJA MODAL				
5321	Belanja Modal Perlatan dan Mesin				
532111	Belanja Modal Perlatan dan Mesin (Pengadaan Scanner Di Intellark)	37.864.000	37.730.227	99,62	143.773
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	37.864.000	37.730.227	99,62	143.773
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Perbaikan Gedung dan bangunan)	192.319.000	188.430.000	97,98	3.889.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	192.319.000	188.430.000	97,98	3.889.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	230.183.000	226.160.227	98,25	4.032.773
	JUMLAH BELANJA	25.280.282.000	26.227.415.637	103,76	-947.133.637



Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja T.A 2018

File Terlampir

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
01	BELANJA PEGAWAI				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	32.190.000	32.197.000	100	400
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	3.000	864	28,8	2.136
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	3.220.000	3.219.700	99,99	240
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	562.000	552.576	98,32	9.424
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2.463.000	2.462.200	99,97	720
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	6.470.000	6.470.000	100	0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2.520.000	2.520.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>49.436.000</b>	<b>49.423.080</b>	<b>99,97</b>	<b>12.920</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/Polri	7.940.135.000	7.936.640.600	99,99	3.294.400
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri	200.000	157.323	78,76	42.677
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri	527.762.000	527.761.700	100	220
	Belanja Tunj. Anak TNI/Polri	165.972.000	165.970.622	100	1.378
	Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri	473.010.000	473.010.000	100	0
	Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	63.487.000	63.486.933	100	1.067
	Belanja Tunj. Beras TNI/Polri	596.423.000	596.291.796	100	131.204
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri	4.562.760.000	4.560.920.000	100	1.860.000
	Belanja Tunj. Kawan/Polwan TNI/Polri	10.052.000	10.000.000	99,99	2.000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/Polri	20.402.000	20.400.000	99,99	2.000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/Polri	3.000	0	0	3.000
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	151.950.000	151.675.000	100	75.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112</b>	<b>14.932.176.000</b>	<b>14.926.763.054</b>	<b>100</b>	<b>5.412.946</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>14.951.612.000</b>	<b>14.976.196.134</b>	<b>100</b>	<b>5.425.866</b>
02	BELANJA BARANG				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran	11.000.000	11.000.000	100	0
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Makan & Wat Tahanan)	347.690.000	347.690.000	100	10.000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97.760.000	97.760.000	100	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Gat Lidik Iaka Sat Lantas )	6.305.226.000	6.304.690.000	100	336.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>6.621.676.000</b>	<b>6.621.530.000</b>	<b>100</b>	<b>346.000</b>
	Belanja Barang Non Operasional Belanja Honor Output Kegiatan	14.400.000	14.400.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Barang Persediaan				
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	333.972.000	333.972.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5216</b>	<b>333.972.000</b>	<b>333.972.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	397.310.000	396.219.000	100	1.091.000
	Belanja Langganan Telepon	14.036.000	14.036.000	100	0
	Belanja Langganan Air	52.575.000	52.575.195	99,99	2.805
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>463.921.000</b>	<b>462.831.000</b>	<b>99,76</b>	<b>1.092.991</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.000.000	196.000.000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	650.631.000	650.631.000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.593.036.000	2.593.036.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>3.399.670.000</b>	<b>3.399.670.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa	242.295.000	242.060.000	99,9	235.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>242.295.000</b>	<b>242.060.000</b>	<b>99,9</b>	<b>235.000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>13.276.137.000</b>	<b>13.274.463.009</b>	<b>99,99</b>	<b>1.673.991</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27.657.749.000</b>	<b>27.650.646.143</b>	<b>99,99</b>	<b>7.099.857</b>

Tabel 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja T.A 2019

File Terlampir

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNPoId	35.580.000	35.579.700	100	300
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNPoId	2.000	221	10,55	1.779
	Belanja Tunj. Suasana/Idi PNS TNPoId	3.000.000	3.007.970	99,97	1.030
	Belanja Tunj. Anak PNS TNPoId	504.000	503.540	99,85	460
	Belanja Tunj. Bersas PNS TNPoId	2.390.000	2.389.800	99,99	140
	Belanja Uang Makan PNS TNPoId	8.330.000	8.330.000	100	0
	Belanja Tunjangan Urusan PNS TNPoId	2.520.000	2.520.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	52.946.000	52.943.831	99,99	4.169
	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/Polri	8.154.708.000	8.154.708.700	100	300
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri	144.000	123.321	99,78	20.679
	Belanja Tunj. Suasana/Idi TNI/Polri	537.942.000	537.940.570	100	1.430
	Belanja Tunj. Anak TNI/Polri	172.999.000	172.999.538	100	462
	Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri	483.090.000	483.090.000	100	0
	Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	69.408.000	69.405.125	100	2.875
	Belanja Tunj. Bersas TNI/Polri	582.590.000	582.589.000	100	1.000
	Belanja Tunj. Laskar Pak TNI/Polri	4.438.080.000	4.438.080.000	100	0
	Belanja Tunj. Kewas/Polres TNI TNI/Polri	8.501.000	8.500.000	99,99	1.000
	Belanja Tunj. Babinkambras TNI/Polri	20.101.000	20.100.000	100	1.000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/Polri	2.000	0	0	2.000
	Belanja Tunjangan Urusan TNI/Polri	148.650.000	148.650.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	14.813.214.000	14.813.186.189	100	27.811
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	14.888.188.000	14.888.127.020	100	31.910
52	BELANJA BARANG				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Kebutuhan Pekarangan	0	0		0
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	370.410.000	370.410.000	100	0
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	138.330.000	134.000.000	97,31	3.720.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.340.000.000	10.321.865.000	99,82	8.115.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	10.988.732.000	10.896.893.000	99,89	11.839.000
	Belanja Barang Non Operasional				
	Belanja Honor Output Kegiatan	14.400.000	14.400.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	14.400.000	14.400.000	100	0
	Belanja Barang Persediaan				
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	289.240.000	289.240.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	289.240.000	289.240.000	100	0
	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	406.110.000	406.109.374	100	626
	Belanja Langganan Telepon	20.356.000	20.356.000	100	0
	Belanja Langganan Air	52.578.000	52.578.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	479.074.000	479.073.374	100	626
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.200.000	147.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	660.901.000	660.901.000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Penggabungan BMP)	2.383.036.000	2.387.867.000	99,78	5.173.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3.201.140.000	3.195.968.000	99,84	5.172.000
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
	Belanja Perjalanan Biasa	242.295.000	242.295.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	242.295.000	242.295.000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	18.094.881.000	18.077.868.374	99,89	17.011.626
53	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.199.000	8.199.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	8.199.000	8.199.000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	8.199.000	8.199.000	100	0
	JUMLAH BELANJA	28.799.239.000	28.752.195.408	99,84	17.043.541



Anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada satuan unit polres berdasarkan pada kebutuhan unit tersebut. Akan tetapi, kondisi yang terjadi justru terkadang tidak sesuai dengan perencanaan laporan realisasi anggaran. Hal tersebut juga terjadi pada satuan Polres Sibolga, dimana terjadinya kesenjangan terhadap anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2015-2019. Kesenjangan yang terjadi terlihat dari belanja pegawai yang penyerapannya berlebih dari anggaran. Untuk anggaran pada Polres Sibolga dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

**TABEL 1.1**  
**Anggaran Polres Sibolga (dalam rupiah)**  
**Tahun Anggaran 2015-2019**

Uraian Kegiatan	TAHUN ANGGARAN					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pegawai	10.230.526.000	14.969.063.000	12.977.970.000	14.581.612.000	13.488.444.000	66.247.615.000
Barang	7.631.191.000	11.484.038.000	11.603.429.000	13.276.137.000	14.294.892.000	58.289.750.000
Modal	-	30.000.000	230.183.000	-	8.199.000	268.382.000
Hibah	-	550.000.000	-	-	800.000.000	1.350.000.000
<b>Jumlah Barang</b>	<b>17.861.717.000</b>	<b>27.033.101.000</b>	<b>24.811.645.000</b>	<b>27.857.749.000</b>	<b>28.591.535.000</b>	

*Sumber:* (Kabagren Polres Sibolga, 2020)

Berikut tabel Pagu Anggaran pada satuan kerja Polres Sibolga yang tertuang dalam Pagu keuangan Polres Sibolga Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yaitu sebagai berikut (dalam Rupiah).

**TABEL 1.2**  
**Realisasi Anggaran Polres Sibolga (dalam Rupiah)**  
**Tahun Anggaran 2015-2019**

Uraian Kegiatan	TAHUN ANGGARAN					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pegawai	14.634.354.883	15.498.497.140	14.564.954.469	14.576.186.134	14.666.127.085	73.940.119.711
Barang	7.515.313.000	10.660.504.348	11.436.310.941	13.274.463.009	14.277.869.374	57.164.460.672
Modal	-	29.822.727	226.150.227	-	8.199.000	264.171.954
Hibah	-	550.000.000	-	-	800.000.000	1.350.000.000
<b>Jumlah Barang</b>	<b>22.149.667.883</b>	<b>26.738.824.215</b>	<b>26.227.415.637</b>	<b>27.850.649.143</b>	<b>29.752.195.459</b>	

*Sumber:* (Kabagren Polres Sibolga, 2020)

Pada tabel tersebut di atas belum terlihat secara spesifik selisih antara anggaran dan realisasi, oleh karena itu berikut merupakan selisih belanja anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

**Tabel 1.3**  
**Selisih Anggaran & Realisasi Polres Sibolga (dalam Rupiah)**  
**Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2019**

Uraian Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih
Pegawai	51.666.003.000	59.363.933.577	-7.697.930.577
Barang	45.013.613.000	43.889.997.663	1.123.615.337
Modal	268.382.000	264.171.954	4.210.046
Hibah	1.350.000.000	1.350.000.000	0

*Sumber:* (Kabagren Polres Sibolga, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut diatas telah terlihat selisih antara anggaran dan realisasi pada belanja pegawai terjadi kesenjangan, hal ini menjadi pertanyaan dan bahan kajian dalam penelitian ini. Terjadinya

kesenjangan anggaran tersebut terjadi apakah kelebihan belanja atau kurangnya anggaran yang dicanangkan pada Polres Sibolga.

Dalam tabel tersebut tidak ditampilkan pagu anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2018, karena pada tahun tersebut anggaran dan realisasi penggunaannya sesuai. Perbedaan yang terjadi pada realisasi dari tahun 2015, 2016, 2017 akan menjadi bahan kajian dalam penulisan ini karena adanya ketidakstabilan anggaran dengan mencari bagaimana prosedur pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran, faktor-faktor penyebab terjadinya keseimbangan anggaran belanja dan upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan keuangan Polres Sibolga dalam periode mendatang dengan secara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakan informasi kepada para

pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Ketidakstabilan anggaran tersebut berupa terjadinya kesenjangan anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga. Hal ini menjadi bahan perhatian dan kajian penulis untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran pada belanja pegawai, kemudian dikaji dan diberikan solusi terhadap permasalahan belanja pegawai tersebut. Berdasarkan Laporan Anggaran dan Realisasi pada Satuan Kerja Polres Sibolga serta uraian tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan pengkajian dan analisis lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Anggaran dan Realisasi pada Satuan Kerja Polres Sibolga”**. Tahun 2015-2019 digunakan sebagai bahan analisis dan kajian kesenjangan belanja pegawai.

## **1.2 Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa terjadinya kesenjangan anggaran dan ketidakstabilan anggaran disebabkan oleh adanya:

1. Anggaran yang dicanangkan tidak sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan
2. Meningkatnya kebutuhan belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga setelah dianggarkan
3. Kemungkinan adanya selisih dalam penghitungan anggaran dengan realisasi anggaran.

4. Tidak seimbangnya anggaran dengan realisasi berjalan
5. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Anggaran dan Realisasi Pada Satuan Kerja Polres Sibolga:

1. Alur dan tata cara pelaksanaan laporan realisasi anggaran di Satuan Kerja Polres Sibolga
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara anggaran dan realisasi pada Satuan Kerja Polres Sibolga
3. Upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan antara anggaran dan realisasi
4. Dalam penelitian ini tahun anggaran yang digunakan yaitu tahun 2015-2019

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan antara anggaran dan realisasi pada Satuan Kerja Polres Sibolga?
2. Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan antara anggaran dan realisasi pada Satuan



Kerja Polres Sibolga periode tahun 2015 2016,2017, 2018 dan 2019?

3. Bagaimana tata cara pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penulis menentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan anggaran belanja pada Satuan Kerja Polres Sibolga
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan atau kesenjangan anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga periode tahun 2015 2016,2017,2019
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang analisis realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga ini memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan ilmu yang selama ini telah diperoleh secara teori di

lapangan berkaitan dengan analisis anggaran dan realisasi pada Satuan Kerja Polres Sibolga, sehingga peneliti dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bekal untuk dapat menjadi manajemen yang berkompeten di kemudian hari. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada akademisi mengenai analisis anggaran dan realisasi pada Satuan Kerja Polres Sibolga, sehingga dapat memberikan suatu karya penelitian baru dan dapat digunakan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan realisasi anggaran belanja pegawai pada instansi pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga bagi Satuan Kerja Polres Sibolga terkait bagaimana analisis realisasi dan anggaran yang mengalami kesejangan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk menunjang perbaikan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Perencanaan dan Penganggaran**

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu(kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe, 2005).

Menurut (Bintaro, 2010) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Listyangsih, 2014).

Istilah anggaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *budget*, berasal dari bahasa Prancis "*bougette*" yang artinya tas kecil. Menurut (Bastian, 2010) berdasarkan *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah diubah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Berikut pengertian anggaran menurut para ahli:

1. (Desiana, 2014)

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana-rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam suatu unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik disektor swasta maupun di sektor publik.

2. Anggaran (*budget*) merupakan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba. Bagi suatu perusahaan, penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan,

alat pengendalian dan lainnya. Dengan menggunakan data-data anggaran, maka perkembangan perusahaan akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

3. (Suharsimi, 2010)

Anggaran suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

4. (Bastian, 2010)

Berpendapat bahwa anggaran merupakan kumpulan pernyataan mengenai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode tertentu yang akan datang.

5. (Abdul Halim, 2016)

Anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.

6. (Mardiasmo, 2011)

Menjelaskan definisi anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

7. (Sri Rahayu, 2013)

Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya.

Satuan Kerja Polres Sibolga dalam praktiknya melakukan pengelolaan keuangannya melalui beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan dan pelaporannya, yaitu tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tahapan-tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan secara umum yaitu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan pada Unit Satuan Kerja Polres Sibolga dilakukan setelah dilakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) yang menjadi dasar dalam menyusun anggaran yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan pada Satuan Kerja Polres Sibolga. Menurut Darlina *et,al* (2016), dalam perencanaan dan penganggaran agar konsisten dan mengikat diperlukan beberapa upaya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan rancangan anggaran harus benar-benar memahami dan mempedomani yang telah ditetapkan meliputi RPJMD, Renstra, Renja, RKPD, dan KUA PPAS.

## 2. Penganggaran

Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Anggaran disusun untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan .

## 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Polres Sibolga merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahapan pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang sudah disusun



dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### 4. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Taip ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu taun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBN atau APBD. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

#### 5. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

## 6. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Polres Sibolga dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Seluruh tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Polres Sibolga tersebut dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas keuangan pada satker terkait. Akuntabilitas keuangan Polres Sibolga tersebut tertuang pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjelaskan mengenai keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada Satuan Kerja Polres Sibolga selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai dengan program atau kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Ruang lingkup dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Laporan Relaisasi Anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga mencakup pada segala kegiatan yang menunjang terkait denngan pelayanan yang diberikan oleh Bag Ren, baik personel dan peralatan disusun dengan sistematika, yaitu pendahuluan, pelaksanaan, aggaran.biaya dan waktu kemudian penutup.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat dijadikan pedoman personel yang bertugas pada Subbag Dalgar Bag Ren Polres Sibolga dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Polres Polres sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan penyerapan Anggaran

pada Subsatker Polres tepatnya pada bagian Subbag Dalgar Bag Ren dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Polres Sibolga sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan penyerapan Anggaran pada Subsatker Polres Sibolga.

Dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran maka bentuk kegiatan yang dilakukan ialah sebagai berikut:

### Gambar 1.6 Acuan dan Prosedur Menyusun LRA



Sumber: (Kabagren, 2020)

Anggaran biaya yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan operasional menggunakan anggaran yang teralokasi pada Kertas kerja RKA-KL dan DIPA Polres Sibolga. Adapun waktu yang diperlukan untuk penyelesaian dalam melakukan setiap proses pelaksanaan kegiatan tersebut di atas dilaksanakan pada setiap awal bulan berjalan.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu alat yang digunakan sebagai pengendalian, perencanaan terkait pengeluaran maupun pendapatan pada periode tertentu dalam suatu perusahaan maupun instansi. Anggaran juga merupakan rencana keuangan yang diwujudkan

dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

#### **2.1.1.1 Prosedur Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Berdasarkan siklus Anggaran Penapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembendaharaan pada [http://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/prosedur anggaran](http://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/prosedur_anggaran) sebagai berikut:

##### **1) Perencanaan dan Penganggaran**

Pada tahap ini dimulai pada periode Januari-Juli, merupakan tahap Penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh Pemerintah disiapkan oleh Pemerintah, BPS dan Bank Indonesia.

Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). RKP/RKAKL mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapat persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara K/L selaku chief of operation officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku chief financial

officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang - Undang APBN yang bersama Nota Keuangan kemudian disampaikan kepada DPR.

Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL. Penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga untuk periode satu tahun dituangkan dalam RKA-KL. Untuk selanjutnya, petunjuk teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan prospektif jangka menengah (medium term expenditure framework), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (performance budget). Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (planning and budgeting).

## 2) Pembahasan APBN

Pada tahap ini dimulai pada periode Agustus-Oktober, Kegiatan pembahasan antara Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Chief Of Operation Officer (COO) dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) dan Menteri Perencanaan, dihasilkan Rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.

Pembahasan RAPBN antara Pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk Nota Keuangan dan RUU APBN 2014, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat Paripurna DPR RI. Dalam pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

### **3) Penetapan APBN**

Tahap ini terjadi pada akhir Oktober, Setelah mempelajari Nota Keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing Fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya. Pandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing Fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke empat Agustus.

APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker, serta pendapatan yang diperkirakan.

#### **4) Pelaksanaan APBN**

Periode Januari, Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, pedoman dalam rangka pelaksanaan anggaran diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.

#### **5) Pelaporan dan Pencatatan APBN**

Periode sepanjang tahun anggaran, Bersamaan dengan tahapan pelaksanaan APBN, K/L dan Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara juga menyusun Laporan Arus Kas.

Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari Pemerintah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

#### **6) Pemeriksaan dan Pertanggung Jawaban**

Periode semester dan annual, Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan, dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui.

Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN pada Bab IX memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini pengawasan

terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan/kepala kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Inspektur Jenderal masing-masing kementerian negara/lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara/lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inspektur Jenderal kementerian negara/lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester I kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran yang bersangkutan.

Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester II dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN Perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester I dan prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak

langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN.

**Gambar 1.1 Siklus APBN**



(Sumber : Kementerian Keuangan Republik )Indonesia (2019)

**Gambar 1.2. Alur Penyusunan DIPA Anggaran**



**Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019)**

**2.1.1.2 Tujuan Dan Manfaat Anggaran**

Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki peranan penting sebagai alat manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan

perusahaan (Sinaga, 2013) Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Pada dasarnya manajemen melakukan penyusunan anggaran sebagai upaya untuk melakukan perencanaan dan pengendalian dalam pencapaian tujuan suatu instansi. (Parulian, 2015) menjelaskan tujuan utama penyusunan anggaran adalah untuk dapat memprediksi tingkat aktivitas operasi dan keuangan suatu instansi yang akan digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan dimasa depan.

Tujuan anggaran menurut (Nafarin, 2013) adalah sebagai berikut:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dari investasi dana;
- b. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan;
- c. Merinci sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan;
- d. Sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal;
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat;
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa tujuan anggaran merupakan landasan yuridis dalam menentukan sumber atau jenis investasi dana, sebagai alat pengawasan dan penyempurna rencana anggaran serta mampu menganalisis setiap usulan yang berkaitan dengan anggaran.

Sedangkan manfaat atau fungsi anggaran (Sjarweni, 2015) adalah sebagai berikut:

- a. Alat perencanaan, yaitu anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik;
- b. Alat pengendalian, anggaran sebagai alat pengendalian ini dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif;
- c. Alat kebijakan fiskal, dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik, hal ini akan mempermudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi;
- d. Alat politik, bentuk dokumen politik dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu;
- e. Alat koordinasi dan komunikasi, dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit kerja sebagian seluruh bagian organisasi. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi;
- f. Alat penilaian kerja, anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja, dimana penilaian

- kinerja organisasi sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran;
- g. Alat motivasi, anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisiensi. Dengan membuat anggaran yang dapat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi, maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik;
  - h. Alat menciptakan ruang publik, keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat DPR/MPR masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat anggaran merupakan alat kontrol pergerakan keuangan, mencegah terjadinya pemborosan, memprioritaskan penggunaan anggaran pada kegiatan yang lebih menguntungkan serta sebagai bahan kajian/analisis peningkatan kinerja.

### **2.1.1.3. Faktor-Faktor Anggaran**

Proses penyusunan anggaran terdapat pertimbangan yang perlu diperhatikan, karena mengabaikan faktor eksternal dan internal dalam proses penyusunan anggaran merupakan jaminan kegagalan realisasi anggaran di dalam perusahaan. Oleh sebab itu faktor-faktor eksternal dan internal yang terkait harus diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran.

Menurut (Rudianto, 2012) terdapat beberapa pertimbangan yang menyangkut motivasi berkaitan dengan penyusunan anggaran, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat Kesulitan

Anggaran yang terlalu sulit untuk dapat dicapai membuat pelaksanaan anggaran tidak bersemangat dalam mencapainya. Anggaran yang terlalu mudah untuk dicapai mungkin dapat membuat pelaksana anggaran tidak berprestasi sesuai dengan kemampuan dan serealistis mungkin. Realistis berarti anggaran disusun dengan standar yang mampu dicapai dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

b. Partisipasi Manajemen Puncak

Manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan mengesahkan anggaran, tanpa partisipasi aktif dalam proses pengesahan akan besar godaan bagi pelaksana anggaran untuk menyerahkan anggaran yang mudah dicapai.

c. Keadilan

Agar anggaran efektif maka pelaksanaan anggaran harus percaya bahwa anggaran ini memang adil, ini berarti sistem anggaran biasanya merupakan sistem bawah ke atas dimana pelaksanaan anggaran yang menyiapkan usulan anggaran tersebut.

d. Kesulitan Departemen Anggaran



Departemen anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci dan harus memastikan anggaran serta informasi yang terkandung di dalamnya akurat.

e. Struktur Organisasi

Pelaksanaan anggaran yang harus berasa dalam organisasi yang sangat terstruktur cenderung merasa memiliki pengaruh lebih besar, lebih banyak berpartisipasi dalam perencanaan anggaran lebih merasa puas dalam melaksanakan anggaran. Dalam pembuatan anggaran banyak perusahaan yang mengalami kegagalan, hal ini mungkin karena kurang memperhatikan hal berikut:

- 1) Pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan dan tidak memiliki wawasan luas
- 2) Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas
- 3) Tidak didukung oleh anggota perusahaan
- 4) Dana yang tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan- kegiatan perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

Menurut (Nafarin, 2013) proses penyusunan anggaran dibagi kedalam beberapa tahapan, yakni:

1) Penentuan Pedoman Anggaran

Pembuatan anggaran pada tahun yang akan datang sebaiknya telah dipersiapkan beberapa bulan sebelum tahun

anggaran dimulai, dengan begitu anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

#### 2) Persiapan Anggaran

Sebelum menyusun anggaran penjualan, manajer pemasaran terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan. Tahap persiapan anggaran ini biasanya diadakan rapat atas bagian terkait saja.

#### 3) Tahap Penentuan Anggaran

Tahap ini semua manajer dan direksi mengadakan rapat perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran, pengesahan dan pendistribusian anggaran.

#### 4) Pelaksanaan Anggaran

Untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Kemudian dianalisis dan laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi.

#### **2.1.1.4 Syarat Menyusun Anggaran**

Agar penyusunan anggaran ini dapat dikatakan tepat sasaran, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa hal yakni (Nafarin, 2013):

- 1) Realistis, suatu anggaran haruslah memperhatikan kemampuan yang ada baik secara financial maupun sumber daya yang mendukung. Dengan menyusun yang realistis, maka biaya yang dikeluarkan akan efisien serta penerimaan laba akan berjalan secara efektif.
- 2) Fleksibel, suatu anggaran dapat menyesuaikan dengan keadaan yang sewaktu-waktu berubah. Fleksibilitas suatu anggaran akan mudah membantu apabila terjadi suatu hal yang diluar dugaan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan banyak terbuang.
- 3) *Continue*, suatu anggaran haruslah selalu mendapat perhatian terus menerus.  
  
Keberlanjutan suatu anggaran akan mudah memprediksi yang akan terjadi pada periode anggaran selanjutnya, sehingga akan mempermudah memprediksi biaya dan laba dimasa mendatang.

### **2.1.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diatur satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Menurut (Hertianti, 2010) realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan

yang diinginkan. Realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan menurut (Prasetyo, 2010) Realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan undang-undang.

Menurut (Rasdianto, 2013) tentang laporan realisasi anggaran adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3. Tujuan Dan Manfaat Realisasi Anggaran**

Tujuan Realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran anggaran

dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati.

- a. Tujuan standart Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang laporan realisasi anggaran, manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang, jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintahan tidak dijadikan pembenaran atas ketidak mampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realiasi anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Menurut (Darise, 2014), manfaat dari informasi laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari semua entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomis.
- 2) Laporan informasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomis yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa, dalam situasi tertentu hingga laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang dan lebih pendek dari satu tahun.

Aturan mengenai penyusunan anggaran berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2020. Pedoman penyusunan APBD adalah ketentuan pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.177/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Acuan dalam penyusunan dan prosedur anggaran pada unit tugas polres dapat dilihat pada gambar 1.3

**Gambar 1.3 Acuan Penyusunan dan Prosedur Anggaran**



Gambar 1.3, pada acuan penyusunan anggaran yaitu rencana kerja polres, kertas kerja RKA-KL, daftar isian pelaksanaan anggaran,

DIPA, petunjuk operasional kegiatan (POK). Tujuan disusun standar operasional yaitu sebagai pedoman tentang prosedur dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan polres selama satu tahun kedepan. Setelah di buat acuan penyusunan rencana kerja, maka dilakukan prosedur yang meliputi mendatakan anggaran yang telah di distibusikan Subsatker jajaran, melaksanakan Rekapitulasi anggaran yang telah diserap, kirim ke Polda untuk laporan pada satuan di atas.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bertujuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja untuk mewujudkan *good government*.

**Gambar 1.4. Alur Anggaran Kepolisian Republik Indonesia**



*Sumber: Satuan Polres Sibolga*



Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat dijadikan pedoman personel yang bertugas pada Subbag Progar Bag Ren Polres Sibolga dalam penyusunan Anggaran Polres Sibolga sehingga dapat memberikan masukan kepada pimpinan guna dapat menentukan kebijakan lebih lanjut. Personel yang memberikan pelayanan terdiri dari seluruh personel Polri/PNS Polri yang bertugas pada Subbag Progar Bag Ren dengan struktur sebagai berikut:

<b>Kabag Ren</b>
<b>Kasubbagprogar</b>
<b>Paur Progar</b>
<b>Bamin</b>
<b>Banum</b>

*Sumber: Polres Sibolga (Kabagren, 2020)*

Untuk menunjang pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan menggunakan sarana dan peralatan Inventaris yang ada pada Subbag Progar Bag Ren Polres Sibolga dengan dilengkapi fasilitas layanan yaitu berupa Laptop, printer, ATK Meja dan Kursi. Penyusunan anggaran Polres dilakukan dalam bentuk:

- a) Menyusun Pagu Ideal Satuan Kerja
- b) Menyusun Pagu Indikatif Satuan Kerja
- c) Menyusun Pagu Anggaran Satuan Kerja
- d) Menyusun Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja
- e) Menyusun TOR dan RAB dari masing-masing kegiatan tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

- a) Acuan Penyusunan
  - (1) Rencana Kerja Polres

(2) Rencana Kegiatan Subsatker

(3) LAKIP

b) Prosedur

(1) Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

(2) Menyusun anggaran Polres

(3) Melaksanakan paparan dan pengesahan

Laporan Realisasi Anggaran merupakan data awal untuk mengetahui penyerapan anggaran yang dilakukan fungsi-fungsi di Satuan Polres Sibolga. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga/institusi sebagai pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Eskalasi perkembangan diberbagai aspek bidang ideologi politik, ekonomi dan sosial budaya menurut Polri harus menyesuaikan diri melalui kesiapan, kelembagaan, teknologi, anggaran serta metode pelaksanaan sistem. Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting di samping yang lainnya yaitu dukungan anggaran dari waktu ke waktu terjadi perkembangan yang berkaitan dengan pendekatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan anggaran yang harus dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga.

Reformasi pengelolaan keuangan negara diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal ini membawa banyak perubahan dalam sistem dan proses pengelolaan keuangan negara diantaranya adalah pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yang intinya dititik beratkan

pada aspek kinerja dengan capaian output yang jelas dan terukur serta normalisasi penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran yang baik seharusnya sesuai dengan rencana kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RDP) sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan anggaran. Pengemban fungsi perencanaan harus memperhatikan capaian target realisasi anggaran, mengingat pemerintah menerapkan penghargaan dan sanksi dibidang anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Persentase penyerapan anggaran minimal 95%;
- 2) Persentase capaian output minimal 95%;
- 3) Laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sedangkan sanksi akan dikenakan pada Kementerian Keuangan/Lembaga dengan kriteria yaitu terdapat sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih besar dari hasil optimalisasi yang belum dipergunakan pada tahun anggaran sebelumnya.

**Gambar 1.5. Standar Operasional Prosedur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Polres Sibolga**



## 2.1 Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu dan berkaitan dengan analisis anggaran dan realisasi ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Marchelino Daling/2013	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja pendapatan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum cukup baik, dapat dilihat dari pendapatan periode 2009-2011 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. PAD yang tidak signifikan menjadi salah satu faktor pendorong pendapatan yang kurang terealisasi dari yang telah dianggarkan.</li> <li>2. Kinerja belanja dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah baik, dikarenakan belanja yang relatif kecil ditambah dengan penghematan belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga mendapatkan SILPA surplus yang nantinya bisa digunakan</li> </ol>

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			untuk pembangunan daerah dan lain sebagainya.
2.	Ramlan Basri/2013	Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara	<p>1. Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran.</p> <p>2. Pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>3. Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95,30 %. 1. Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun</p>

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran. Pembahasan KUA dan PPAS dengan TAPD tidak diikuti oleh semua bidang yang ada di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara.</p> <p>4. Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 sebesar 95,30 %.</p>
3.	Bambang Dwi Seseno/2011	Analisis Anggaran Terhadap Realisasi Divisi Pelayanan Jasa Pada PT. Persero Pelabuhan Indonesia II Cabang Banten	<p>1. Penyusunan anggaran pada PT. (Persero) Pelindo II Cabang Banten dilakukan melalui pendekatan campuran yaitu gabungan antara <i>top down</i> dan <i>bottom-up</i>, yang menjadi indikator dalam penyusunan anggaran adalah asumsi, kebijakan perusahaan, musim, dan data historis dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi.</p> <p>2. Masih terjadi selisih yang tidak menguntungkan (<i>unfavourable</i>) sebesar negatif 18.55% dan bersifat material bagi PT. (Persero) Pelindo II Cabang Banten.</p> <p>3. Terdapat korelasi yang positif, searah dan signifikan antara anggaran arus kunjungan kapal dan arus barang terhadap pelaksanaan atau realisasi arus kunjungan kapal dan arus barang.</p>
4.	Fitriaman, Wa Ode Aswati, Eka Wahyuni/2019	Analisis Anggaran Dan Realisasi Pada Badan Pengelola	1. Realisasi anggaran pendapatan tahun 2017 tidak menguntungkan ( <i>Unfavorable</i> ) jika dilihat dari perbandingan realisasi pendapatan dengan

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe	<p>tahun 2016. Disebabkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi pelayanan pasar, memiliki nilai realisasi dibawah anggaran yang telah ditetapkan</p> <p>2. Sedangkan realisasi anggaran belanja pada tahun 2017 menguntungkan (<i>Favorable</i>) jika dilihat dari realisasi belanjanya tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe telah mampu mengefisienkan belanja gaji daan tunjangan pegawai dan peralatan dan mesin yang berpengaruh secara langsung terhadap belanja</p>
5.	Astria Nurjannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walindow/2015	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	<p>1. Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif dari tahun ke tahun.</p> <p>2. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektifitas diatas 100%.</p> <p>Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran</p>

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>2009-2013 secara keseluruhan kurang efisien dari tahun ke tahun.</p> <p>3. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Kota Bitung kurang mengefisienkan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati</p>
6.	Zulfikar Umar/2016	Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh 2014	<p>1. Realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 669.552.780.744, atau sebesar 97,62%. Dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.685.848.490.825. Dengan surplus anggaran sebesar Rp. 16.295.710.081 atau sebesar 2,38%. Dengan demikian realisasi anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh adalah efektif dalam penggunaan anggaran, dikarenakan pada tahun anggaran 2014 target yang dicapai adalah lebih dari 90% dari target yang ingin dicapai dan direncanakan. Dengan demikian dapat sarankan</p> <p>2. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh sebagai lembaga pelayanan masyarakat harus mampu menampung masukan dan pendapat dari masyarakat daerah maupun kota mengenai pembangunan dan</p>



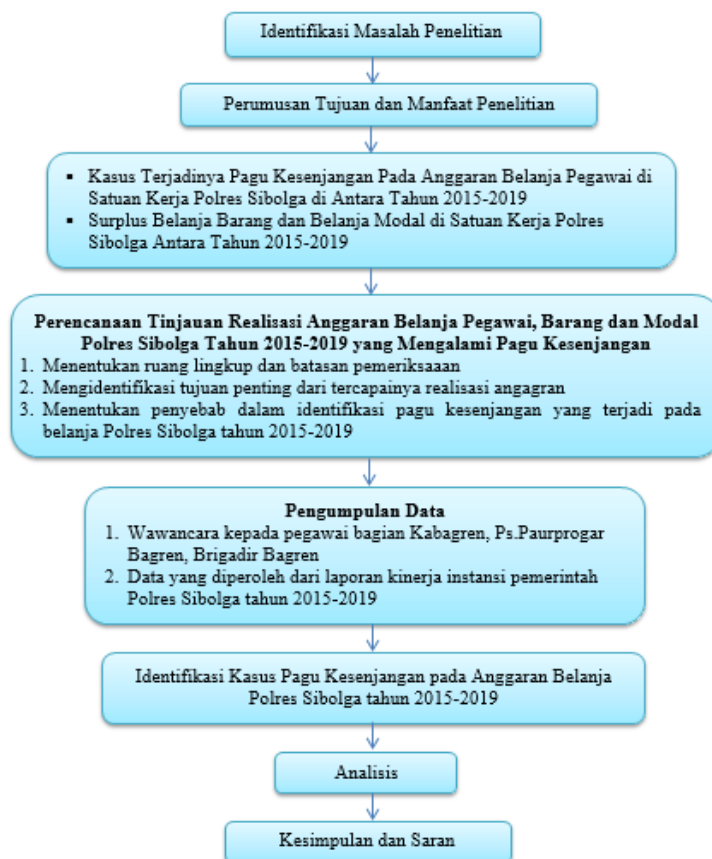
No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan pada Provinsi Aceh.</p> <p>3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh harus terus berupaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja untuk masa yang akan datang.</p>
7.	Yosi Amalia/2020	Analisis Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasional Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru	<p>1. Dalam anggaran dan Realisasi biaya perasional PT. Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru tahun 2017-2019, pada mata anggaran biaya operasionalnya memiliki dua variansi atau selisih, yaitu selisih menguntungkan (<i>favorable</i>) dan tidak menguntungkan (<i>unfavorable</i>).</p> <p>2. Dilihat dari total anggaran tahun 2017-2019, anggaran biaya operasional sudah disusun dengan baik dan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Namun dalam anggaran di setiap tahun terdapat beberapa jenis atau item biaya operasional yang tidak terkendalikan dan membuat anggaran dengan realisasi biaya berbeda jauh, kemudian membuat perusahaan rugi atau <i>over budget</i> karena anggaran yang di anggarkan oleh perusahaan terlalu kecil dibandingkan realisasi perusahaan tersebut. Seperti ditahun 2017 terdapat biaya administrasi dan umum, di tahun 2018 terdapat biaya pemasaran dan administrasi sedangkan di tahun 2019 terdapat biaya pemasaran</p>

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			yang <i>over</i> atau merugikan perusahaan.
8.	Fanda Jessika Mentang/2020	Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada saat menyusun anggaran belanja ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran. Faktor-faktor pertimbangan tersebut yaitu: kegiatan harus ada luaran yang jelas, efisiensi (kesesuaian harga), dan anggaran tahun sebelumnya.</li> <li>2. Hasil dari analisis variansi yang dilakukan pada anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado, secara keseluruhan selisih yang terjadi masih menguntungkan, karena realisasi masih lebih rendah dari yang dianggarkan.</li> <li>3. Penyebab terjadinya selisih dikarenakan ada penghematan pada beberapa kegiatan, dengan selisih tahun 2016 sebesar Rp 2.038.250.721,00 dan tingkat persentase ketercapaian belanja 86,79%. Selisih tahun 2017 sebesar Rp.2.400.948.640,00 dan tingkat persentase ketercapaian belanja 84,12%. Selisih tahun 2018 sebesar Rp1.760.466.955,00 dan tingkat persentase ketercapaian belanja 90,88%.</li> </ol>

### 2.3 Kerangka Berfikir/Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.7 Kerangka Konseptual/Berfikir



Kerangka pemikiran merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sehingga pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang dilakukan. Realisasi anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Kerangka pada penelitian ini mengulas tentang permasalahan analisis realisasi anggaran belanja di Polres Sibolga tahun 2015-2019, dimana

terdapat kesenjangan anggaran di antara tahun tersebut. Fokus pada penelitian ini yakni :

- 1) Kesenjangan anggaran dan realisasi belanja pada satuan kerja Polres Sibolga;
- 2) Faktor kesenjangan anggaran dan realisasi belanja pegawai;
- 3) Faktor-faktor surplus anggaran dan realisasi belanja barang;
- 4) Upaya penanggulangan dan pencegahan kesenjangan;
- 5) Alur pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2017).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan menurut Lexy (2004) adalah penelitian untuk memperoleh informasi mengenai analisis Laporan Realisasi Anggaran yang kesejangan pada Satuan Kerja Polres Sibolga, untuk itu perlu diketahui faktor-faktor penyebab hal tersebut terjadi.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian mengenai Analisis Realisasi dan Anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga dilaksanakan di Kantor Polres Sibolga Jalan FL. Tobing No. 35 Kota Sibolga, yaitu bulan September-Desember 2020:

**Tabel 3.2 Pelaksanaan Waktu Penelitian**

No	Keterangan	September 2020				Oktober 2020				November 2020				Desember 2020				Januari 2021				Februari 2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pengajuan Judul	■	■																						
2	Pengajuan Proposal Penelitian			■	■																				
3	Penulisan Proposal Tesis			■	■	■	■																		
4	Seminar Proposal Tesis					■	■																		
5	Pengajuan Surat Izin Riset							■	■																
6	Perbaikan Setelah Seminar							■	■																
7	Pelaksanaan Riset									■	■	■	■												
8	Bimbingan													■	■	■	■	■	■	■	■				
9	Sidang Tesis																					■	■		
10	Perbaikan Sidang Tesis																					■	■	■	■

### 3.3 Sumber Data Penelitian

Menurut (Moleong, 2017) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber

langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pada Satuan Kerja Polres Sibolga dengan melakukan wawancara kepada personil dibidang Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran (Kabagren) Polres Sibolga.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015). Adapun data sekunder pada penelitian yaitu infoman yang berasal dari Satuan Polres Sibolga terdiri dari Kabagren Nababan (Kabagren), Hedi Syahputra Hasibuan (Ps.Paurproger bagren), dan Dewi Khairani (Brigadir Bagren).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1. Wawancara**

Menurut Banister 1994 dalam (Poerwandari, 2013) wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai

tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain.

Wawancara terdapat beberapa bentuk, yaitu:

- a. Wawancara informal, yakni proses wawancara yang didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dan interaksi alamiah.
- b. Wawancara dengan pedoman umum, dalam proses wawancara ini, peneliti dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, yang mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (checklist) apakah aspek-aspek relevan tersebut sudah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.
- c. Wawancara dengan pedoman tersatandar yang terbuka.



Dalam bentuk wawancara ini, pedoman wawancara ditulis secara rinci, lengkap dengan set pertanyaan dan penjabarannya dalam kalimat (Poerwandari, 2013).

Tipe wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informal, dimana peneliti didasarkan sepenuhnya pada berkembangnya pertanyaan- pertanyaan secara spontan dan interaksi alamiah. Untuk data hasil wawancara dengan informan terdapat di bagian **Lampiran**.

#### **3.4.2 Observasi**

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah- kaidah yang mengaturnya (Emzir, 2016).

Observasi merupakan metode dengan pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut (Poerwandari, 2013).

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan/keadaan pada topik penelitian.

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara kualitatif (Yaumi, 2014). Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015). Dokumen pada penelitian ini digunakan sebagai data penguat atau pendukung dari data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil wawancara informan pada penelitian ini berupa dokumen, dimana isi dokumen tentang laporan anggaran dan realisasi pada satuan Polres Sibolga dan penyebab terjadinya kesenjangan anggaran terutama pada belanja pegawai. Adapun hasil wawancara yang diperoleh dapat dilihat pada bagian **Lampiran**.

### 3.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015)

Dalam penelitian ini penulis mengelola sendiri hasil penelitian langsung dari Satuan Polres Sibolga. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan:

#### a. Analisis Kualitatif

Menurut (Moleong, 2017), mengemukakan bahwa analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### b. Analisis Deskriptif

Mendeskriptifkan kegiatan operasional kegiatan yang ada terutama terkait tentang proses realisasi dan anggaran kegiatan keuangan Satuan Kerja Polres Sibolga yang biasa terjadi atau dilakukan di Polres Sibolga tersebut, menganalisis dan merancang sistem yang cocok untuk diterapkan dan memberikan

rekomendasi tentang sistem realisasi dan anggaran pada kegiatan laporan keuangan di Satuan Kerja Polres Sibolga.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka penelitian ini menganalisis data berikut:

- 1) Membandingkan antara realisasi dan anggaran
- 2) Penyebab terjadinya kesenjangan antara anggaran dan realisasi
- 3) Mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran dan realisasi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Data Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 di Kantor Polres Sibolga Jalan FL. Tobing No. 35 Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Metode analisis data menggunakan analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Berdasarkan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif yang diamati yaitu untuk membandingkan antara realisasi dan anggaran. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kesenjangan antara realisasi dan anggaran. Mencari faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran dan realisasi. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara informan.

##### **4.1.1. Deskripsi Anggaran**

Anggaran merupakan rencana yang telah disusun dengan sistematis yang dibuat dalam bentuk angka kemudian dinyatakan kedalam bentuk unit moneter secara keseluruhan untuk kegiatan dalam periode jangka waktu yang ditentukan dimasa mendatang. Anggaran pada Pagu Polres Sibolga di susun untuk satu tahun ke depan, tujuan dari pembuatan anggaran yaitu untuk melakukan estimasi terhadap keuangan yang tersedia di Pagu Polres Sibolga. Adapun anggaran yang direncanakan pada Pagu Polres Sibolga meliputi :

1. Belanja pegawai meliputi gaji pokok PNS/Polri, tunjangan suami/istri TNI/Polri, tunjangan strukturan TNI/Polri, tunjangan beras TNI/Polri dan uang makan TNI/Polri, sumbangan personel yg menikah.
2. Belanja barang meliputi honor output kegiatan, perawatan kendaraan bermotor, perbaikan peralatan fungsionaris, pengadaan dan perbaikan peralatan kantor, belanja dan perawatan peralatan operasional kepolisian.

#### **4.1.2. Deskripsi Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran disajikan dalam bentuk laporan atau biasa disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran (RLA). Laporan dibuat untuk memberikan informasi terhadap realisasi anggaran yang telah disusun dimana meliputi surplus/defisit, jenis pembiayaan realisasi anggaran, dan sisa dari anggaran apakah lebih/kurang. Laporan realisasi anggaran (LRA) pada Pagu Polres Sibolga dibuat diakhir tahun atau satu tahun periode.

#### **4.2. Temuan Penelitian**

Peneliti akan memaparkan terkait dengan temuan hasil penelitian yang merupakan deskripsi serta data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dalam penelitian ini akan melakukan analisis hasil penelitian mengenai realisasi terhadap anggaran Satuan Polres Sibolga.

Adapun data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dideskripsikan berdasarkan data-data umum terlebih dahulu. Pada penelitian ini, peneliti membuat batasan penelitian yaitu untuk mengetahui alur dan tata cara pelaksanaan laporan realisasi anggaran di Satuan Kerja Polres Sibolga; faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara anggaran dan realisasi; Upaya penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi kesenjangan antara anggaran dan realisasi; dalam penelitian ini tahun anggaran yang digunakan yaitu tahun 2015-2019. Hasil dari temuan penelitian ini merupakan hasil dari wawancara mendalam dengan informan beserta lingkungannya untuk menemukan data yang diperlukan dan melakukan studi dokumentasi.

#### **4.2.1. Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran di Polres Sibolga Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019**

Anggaran yang merupakan suatu perencanaan keuangan pada satuan Polres Sibolga yang bersumber dari pendapatan yang diperoleh berasal dari pendapatan negara dan hibah yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah. Anggaran keuangan Polres Sibolga dianggarkan dalam periode setiap tahun. Pada penelitian ini data untuk mengetahui perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran pada Polres Sibolga di ambil data 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Sedangkan realisasi anggaran merupakan penerapan dan pelaksanaan dari anggaran keuangan yang telah dianggarkan pada sebelumnya. Pada kenyataanya anggaran dan realisasi anggaran tidak selalu sama, laporan keuangan dapat menunjukkan bahwa antara anggaran

dan realisasi anggaran menunjukkan kesenjangan. Ini berarti realisasi lebih besar dari pada yang dianggarkan, hal ini terjadi pada laporan keuangan Polres Sibolga periode laporan keuangan. Distribusi tabel penggunaan anggaran dan realisasi belanja pegawai Polres Sibolga dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1.**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi**  
**Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2015**

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	44,270,000	5,393,793	12.18	38,876,207
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	2,000	0	0.0	2,000
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	4,428,000	0	0.00	4,428,000
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1,771,000	0	0.00	1,771,000
	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	6,370,000	0	0.00	6,370,000
	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	2,057,000	0	0.00	2,057,000
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2,171,000	0	0.00	2,171,000
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	7,920,000	0	0.00	7,920,000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	11,826,000	0	0.00	11,826,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 1</b>	<b>80,815,000</b>	<b>5,393,793</b>	<b>6.67</b>	<b>75,421,207</b>
2	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	4,698,815,000	7,979,338,500	169.82	-3,280,523,500
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	137,000	164,907	120.37	-27,907
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	443,022,000	567,858,315	128.18	-124,836,315
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	157,154,000	178,104,062	113.33	-20,950,062
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	373,230,000	586,600,000	157.17	-213,370,000
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	239,801,000	355,675,266	148.32	-115,874,266
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	618,610,000	696,715,040	112.63	-78,105,040
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	3,438,000,000	4,122,055,000	119.90	-684,055,000
	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	1,300,000	5,800,000	446.15	-4,500,000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	22,100,000	0	0.00	22,100,000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	14,690,000	0	0.00	14,690,000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI	10,252,000	0	0.00	10,252,000
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	132,600,000	136,650,000	103.05	-4,050,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 2</b>	<b>10,149,711,000</b>	<b>14,628,961,090</b>	<b>144.13</b>	<b>-4,479,250,090</b>
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>10,230,526,000</b>	<b>14,634,354,883</b>	<b>143.05</b>	<b>-4,403,828,883</b>

Sumber : (Kabagren, 2020)

Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi digunakan untuk belanja pegawai dan belanja modal. Pada belanja pegawai anggaran yang direncanakan dengan besaran dana yang disediakan sebesar Rp 10,230,526,000 sedangkan realisasi mencapai Rp 14,634,354,883 sehingga



selisih anggaran sebesar (Rp 4,403,828,883) atau sebesar -43.05%. Sehingga dana anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan target yang direncanakan atau realisasi anggaran mengalami kelebihan dari anggaran. Adapun penyebab dari kesejangan realisasi terhadap anggaran Polres Sibolga yang terjadi pada tahun 2015 yaitu penggunaan biaya yang tidak terduga diluar seperti sumbangan personel Polres Sibolga yang menikah ditahun tersebut, mutasi personil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bertambahnya tanggungan keluarga. Uraian pada belanja pegawai meliputi gaji pegawai dan tunjangan PNS, belanja gaji pokok PNS/Polri, tunjangan suami atau istri, tunjangan beras, uang makan, dan juga uang duka PNS. Penggunaan terbesar pada belanja pegawai yaitu gaji dan tunjangan TNI/Polri mencapai 7.979.338.000 atau terjadinya kesenjangan -3.280.523.500.

Menurut Hedi Hasibuan Staf Personil Satuan Kerja Polres Sibolga bahwa faktor penyebab dari permasalahan pagu kesejangan yang terjadi di Satuan Kerja Polres Sibolga adalah Pagu kesejangan Belanja Pegawai, pagu kesejangan pada belanja pegawai disebabkan pada saat penyusunan pagu Polres Sibolga personil yang dipergunakan yakni personil rill yang ada di Polres Sibolga. Namun akibat mutasi akan ada penambahan personil, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala. Selain itu, tunjangan umum TNI/Polri kebijakan baru yang berkaitan dengan kenaikan pangka, sehingga biaya yang dianggarkan berlebih pada saat realisasi.

Menurut Dewi Khairani, S.H/Brigadir Bagren (2020), kesenjangan juga terjadi dikarenakan kenaikan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji

dengan keadaan riil yang ada dan disesuaikan dengan adanya ketentuan dan ketetapan baru yang mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima, sehingga anggaran yang dibutuhkan juga mengalami peningkatan. Hal senada dikatakan oleh (Kabagren, 2020), kenaikan pangkat paling banyak terjadi di tahun 2015 sehingga ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran belanja pegawai terjadi karena personel yang mengalami kenaikan pangkat akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang baru sesuai dengan pangkat dan tentu jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu, kesejangan anggaran dan realisasi juga terjadi pada belanja barang seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa anggaran belanja barang di Pagu Polres Sibolga pada tahun 2015 sebesar Rp 7,631,191,000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 7,515,313,000 dengan sisa anggaran sebesar Rp 115,878,000 atau 1.52%. Artinya, antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi sesuai dari yang ditetapkan. Penggunaan anggaran yang digunakan pada belanja barang terdiri dari pembelian peralatan kantor, perawatan atau perbaikan peralatan kantor, pembelian ATK, perbaikan dan perawatan peralatan fungsional. Pengelolaan keuangan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan dimasa mendatang, semakin besar jumlah dana yang tersedia maka akan menyebabkan semakin tinggi cara pengelolaannya terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga dana yang digunakan jika bersisa akan dapat digunakan pada periode berikutnya.

**Tabel 4.2.**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja**  
**Barang Polres Sibolga Tahun 2015**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI	SISA ANGGARAN
	<b>Belanja Barang Operasional</b>				
	Belanja Keperluan Perkantoran	303,200,000	303,200,000	100.00	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (MT-88 / HSD)	576,700,000	576,582,500	99.98	117,500
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Uang makan Non Organik Polres)	224,475,000	173,415,000	77.25	51,060,000
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pendudukan Tindak Tipikor)	85,818,000	85,818,000	100.00	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pengadaan BMP (PNBP))	264,250,000	250,104,500	94.65	14,145,500
	Belanja Keperluan Perkantoran	7,500,000	7,500,000	100.00	0
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,800,000	7,800,000	100.00	0
1	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pulsa PDA SKCK Polsek)	43,720,000	43,120,000	98.63	600,000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (Honor Operator Dana Iaku Lintas)	7,200,000	0	0.00	7,200,000
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Pulsa Ops tablet Kamtibmas di Bid Lintas)	117,600,000	116,800,000	99.32	800,000
	Belanja Keperluan Perkantoran	4,200,000	4,200,000	100.00	0
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (Honor Pelaksanaan SIM dan SAMSAT)	104,790,000	83,790,000	81.87	19,000,000
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Giat Pam Obvit)	643,297,000	635,293,000	98.76	8,004,000
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	153,270,000	153,270,000	100.00	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya	6,708,912,600	3,507,726,00	100.00	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Duk Ops Bhabinkamtibmas)	369,829,000	362,179,000	97.93	7,650,000
2	<b>Belanja Barang Non Operasional</b>				
	Belanja Honor Output Kegiatan (Honor Operator RKA/KL)	7,200,000	6,900,000	95.83	300,000
3	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	421,970,000	421,970,000	100.00	0
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	144,000,000	144,000,000	100.00	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24,600,000	24,600,000	100.00	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Satpas PI)	41,361,000	34,375,000	83.11	6,986,000
4	<b>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</b>				
	Belanja Perjalanan Dinas	81,000,000	80,985,000	99.98	15,000
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>7,631,191,000</b>	<b>7,515,313,000</b>	<b>98.48</b>	<b>115,878,000</b>

(Sumber : Kabagren, 2020)

Menurut Kabagren, 2020 pada belanja barang anggaran digunakan paling banyak yaitu belanja operasional. Belanja operasional meliputi belanja keperluan kantor, pengadaan bahan bakar minyak dan pelumas (MT-88/HSD), pengadaan bahan makanan (uang makanan non organic Polres). Sedangkan pada belanja operasional lainnya digunakan untuk pengadaan pendudukan tindak tipikor, pengadaan BMP, pulsa PDA SKCK Polres). Selain itu, belanja non operasional berupa honor, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan dan belanja perjalanan dalam negeri. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015, anggaran untuk belanja barang di Polres Sibolga sesuai dengan

realisasi dilapangan. Sehingga tidak terdapat kesejangan pada anggaran belanja barang.

Tahun 2016 Pagu Polres Sibolga pada belanja dibagi menjadi tiga rencana anggaran yang telah ditetapkan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, berbeda jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana belanja modal tidak di anggarkan. Secara rinci rekapitulasi anggaran dan realisasi pada Pagu Polres Sibolga dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

**Tabel 4.3.**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2016**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	BELANJA PEGAWAI				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	37,207,000	37,206,960	100	40
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	3,000	474	15.8	2,526
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	3,544,000	3,543,520	99.99	480
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2,608,000	2,607,120	99.97	880
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	7,920,000	4,110,000	51.89	3,810,000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	3,601,000	3,600,000	99.97	1,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>54,883,000</b>	<b>51,068,074</b>	<b>93.05</b>	<b>3,814,926</b>
2	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	8,328,919,000	8,855,394,550	106.32	-526,475,550
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	178,000	162,488	91.29	15,512
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	574,481,000	574,966,355	100.08	-485,355
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	183,129,000	183,323,008	100.11	-194,008
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	519,091,000	519,580,000	100.09	-489,000
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	229,750,000	229,749,717	100	283
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	681,328,000	682,152,948	100.12	-824,948
	Belanja Tunj. Lauk Paku TNI/POLRI	4,217,051,000	4,221,700,000	100.11	-4,649,000
	Belanja Tunj. Kowas/Pobwas TNI/POLRI	9,301,000	9,300,000	99.99	1,000
	Belanja Tunj. Bobinkamribnas TNI/POLRI	18,701,000	18,700,000	99.99	1,000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	0		0
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	152,251,000	152,400,000	100.1	-149,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>14,914,180,000</b>	<b>15,447,429,066</b>	<b>103.58</b>	<b>-533,249,066</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,969,063,000</b>	<b>15,498,497,140</b>	<b>103.54</b>	<b>-529,434,140</b>

Sumber : (Kabagren, 2020)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada belanja pegawai Pagu Polres Sibolga anggaran sebesar Rp 14,969,063,000 dan realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp 15,498,497,140. Terdapat selisih atas anggaran dan realisasi mencapai (Rp 529,434,140) atau -3.54%. penyebab kesejangan anggaran pada belanja pegawai pada Pagu Polres Sibolga tidak jauh berbeda dengan tahun 2015 seperti sumbangan personel Polres Sibolga yang menikah ditahun tersebut, mutasi personil, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bertambahnya tanggungan keluarga. Akan tetapi jika dilihat ditahun 2015 kesenjangan anggaran sebesar -43.05% jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kesejangan hanya -3.54%.

Menurut Kabagren, (2020) kesenjangan belanja pegawai pada tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan tahun 2015, penyebabnya selain untuk gaji dan tunjangan TNI/polri juga belanja tunjangan yang diakibatkan adanya penambahan dan pengurangan jumlah sumber daya manusia yang dapat yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polres Sibolga, adanya kenaikan gaji atau tunjangan dalam kurun waktu bersangkutan, kenaikan pangkat personel kepolisian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penambahan atau pengurangan yang terjadi berasal dari mutasi personel kepolisian, tugas atau pensiun, adanya penambahan anggota kepolisian baru pada Polres Sibolga.

Menurut Hedi Syahputra Hasibuan/Ps. Paurprogar Bagren (2020), penambahan jumlah sumber daya manusia pada satua kerja Polres Sibolga adalah kondisi yang tidak dapat dikendalikan oleh Polres Sibolga dikarenakan setiap tahunnya terjadi dan jumlah yang berbeda-beda. Hal ini yang menjadi penyebab di Polres Sibolga kesulitan dalam menentukan

jumlah anggaran belanja pegawai yang dibutuhkan untuk dapat mencukupi keseluruhan kebutuhan yang ada pada saat itu dikarenakan tidak dapat diprediksi sebelumnya berkaitan dengan perubahan struktur organisasi dikarenakan sumber daya manusia yang terlibat di dalam Satuan Kerja Polres Sibolga. Selain itu, anggaran untuk belanja barang kebutuhan pada Polres Sibolga dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja**  
**Barang Polres Sibolga Tahun 2016**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	<b>BELANJA BARANG</b>				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran (ATK SKCK Polres & Polsek)	11,700,000	8,704,000	100	2,996,000
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	480,310,000	394,470,000	82.13	85,840,000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	136,280,000	113,170,000	83.04	23,110,000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,894,738,000	7,209,823,500	91.32	684,914,500
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,523,028,000</b>	<b>7,726,167,500</b>	<b>90.69</b>	<b>796,860,500</b>
2	Belanja Barang Non Operasional				
	Belanja Honor Output Kegiatan	7,200,000	7,200,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>7,200,000</b>	<b>7,200,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
3	Belanja Barang Persediaan				
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	261,200,000	261,200,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>261,200,000</b>	<b>261,200,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
4	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	127,449,000	114,672,185	89.97	12,776,815
	Belanja Langganan Telepon	13,546,000	13,211,743	97.53	334,257
	Belanja Langganan Air	22,578,000	22,179,300	98.23	398,700
	<b>JUMLAH</b>	<b>163,573,000</b>	<b>150,063,228</b>	<b>91.74</b>	<b>13,509,772</b>
4	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	327,200,000	326,776,000	99.87	424,000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Satpas P1)	521,331,000	521,322,000	100	9,000
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan BMP)	2,185,950,000	2,173,275,620	99.42	12,674,380
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,034,481,000</b>	<b>3,021,373,620</b>	<b>99.57</b>	<b>13,107,380</b>
5	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
	Belanja Perjalanan Biasa	44,556,000	44,500,000	99.87	56,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>44,556,000</b>	<b>44,500,000</b>	<b>99.87</b>	<b>56,000</b>
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>12,034,038,000</b>	<b>11,210,504,348</b>	<b>93.18</b>	<b>823,533,652</b>

*Sumber* : (Kabagren, 2020)

Pada tabel 4.4 juga terdapat belanja barang Pagu Polres Sibolga dimana anggaran dana direncanakan sebesar Rp 12,034,038,000, realisasi anggaran sebesar Rp 11,210,504,348 dengan sisa atau kelebihan anggaran sebesar Rp 823,533,652 atau 6.84%. Tidak jauh berbeda jauh berbeda dari tahun 2015, pada belanja barang cenderung tidak mengalami kesejangan

anggaran. Ini dikarenakan tidak setiap tahun harus membeli peralatan kantor, hanya saja biaya yang dikeluarkan digunakan untuk perawatan peralatan dan pemeliharaan gedung, perawatan senpi, pembelian ATK yang tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi anggaran belanja pegawai pada realisasi anggaran belanja barang peningkatan dan penurunan nilai realisasi tidak begitu signifikan hal ini dikarenakan jumlah kebutuhan akan biaya operasional perkantoran yang meningkat pada tiap tahunnya serta program dan kegiatan-kegiatan yang sama dilakukan di tiap tahunnya.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal tidak bersifat rutin. Pada tabel 4.2 di Pagu Polres Sibolga terlihat bahwa anggaran belanja modal sebesar Rp 30,000,000 dan realisasi sebesar Rp 29,822,727. Artinya anggaran yang diserap untuk belanja modal mencapai 99.41% atau hampir 100% anggaran terserap untuk belanja modal. Adapun belanja modal pada Pagu Polres Sibolga seperti penambahan gedung kantor, Kenaikan dan penurunan jumlah realisasi belanja modal pada satuan kerja Pagu Polres Sibolga menunjukkan adanya prioritas kebutuhan akan belanja modal yang berubah-ubah di tiap tahunnya.

Dalam melakukan penyusunan sebuah perencanaan anggaran, maka perlu diketahui faktor-faktor yang patut dijadikan pertimbangan agar anggaran yang disusun dapat dipergunakan tepat sasaran. Faktor-faktor yang menjadi suatu pertimbangan adalah luaran kegiatan harus dilaporkan dengan jelas, harga harus sesuai atau efisiensi dan anggaran tahun sebelumnya dapat dijabarkan dengan jelas. Pada tabel berikut ini akan dijabarkan alokasi penggunaan anggaran pada Pagu Polres Sibolga tahun 2017.

Tabel 4.5 anggaran belanja pegawai sebesar Rp 13,447,277,000 dan realisasi sebesar Rp 14,564,954,469 dengan selisih anggaran sebesar (Rp 1,117,677,469) atau -8.31%. Jika dilihat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, untuk anggaran belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar 11,32%, ini dikarenakan anggaran pengurangan anggaran dari pusat untuk belanja pegawai. Belanja pegawai diakhir tahun sering kali pelaksanaannya dibawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggaranya. Hal ini ditenggarai karena daerah tidak cukup mampu mengejar peningkatan belanja atau belum cukup mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meyerap pendapatan tersebut saat terjadi tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari transfer Pusat ataupun peningkatan yang lainnya.



**Tabel 4.5**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja**  
**Pegawai Polres Sibolga Tahun 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	31,469,000	31,468,960	100	40
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	3,000	613	20.43	2,387
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	2,919,000	2,918,456	99.98	544
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	412,000	411,192	99.8	808
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2,318,000	2,317,440	99.98	560
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	11,500,000	10,560,000	91.83	940,000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2,340,000	2,340,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>50,961,000</b>	<b>50,016,661</b>	<b>98.15</b>	<b>944,339</b>
2	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	7,820,250,000	8,429,875,250	107.82	-609,625,250
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	156,000	169,572	108.71	-13,572
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	484,625,000	526,579,597	108.7	-41,954,597
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	158,643,000	172,411,416	108.73	-13,768,416
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	427,190,000	482,010,000	112.83	-54,820,000
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	46,007,000	47,483,513	103.21	-1,476,513
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	587,109,000	641,858,460	109.38	-54,749,460
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	3,675,366,000	4,021,950,000	109.47	-346,584,000
	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	9,700,000	10,600,000	109.28	-900,000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	37,800,000	34,700,000	91.8	3,100,000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	13,720,000	0	0	13,720,000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	135,750,000	147,300,000	108.56	-11,550,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>13,396,316,000</b>	<b>14,514,937,808</b>	<b>108.38</b>	<b>-1,118,621,808</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>13,447,277,000</b>	<b>14,564,954,469</b>	<b>108.34</b>	<b>-1,117,677,469</b>

Sumber : (Kabagren, 2020)

Menurut Hedi Syahputra Hasibuan/Ps. Paurprogar Bagren (2020), belanja gaji, tunjangan TNI/Polri pada Polres Sibolga pada setiap tahunnya terjadi kondisi yang sama yang itu kesenjangan belanja pegawai. Proses mutasi jabatan dan kenaikan pangkat anggota TNI/Polri yang selalu terjadi di lingkungan Polres Sibolga. Mutasi dan kenaikan jabatan ini tidak menentu pada setiap tahunnya. Sehingga tidak dapat diprediksi berapa anggota yang akan mengalami mutasi dan berapa anggota yang akan mengisi jabatan atau mengalami kenaikan pangkat. anggota yang mengalami mutasi dan kenaikan pangkat akan langsung mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sesuai dengan jabatan atau pangkat yang terbaru yang

melekat sehingga pada gajipun juga disesuaikan dengan pangkat terbaru, sehingga ini yang dapat menjadi penyebab kesenjangan anggaran di Polres Sibolga.

Selanjutnya pada tabel tabel 4.6 anggaran belanja barang sebesar Rp 11,603,492,000 dan realisasi belanja barang sebesar Rp 11,436,310,941 atau anggaran terserap sebesar 96.58% dengan sisa anggaran sebesar 3.42%. Belanja barang pada Pagu Polres Sibolga jika dilihat dari tahun sebelumnya juga tidak mengalami kesenjangan anggaran. Sehingga tidak terdapat kesenjangan pada anggaran belanja barang. Penggunaan belanja barang umumnya masih tetap sama dengan tahun sebelumnya seperti perawatan peralatan dan pemeliharaan gedung, perawatan senpi, pembelian ATK yang tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ramlan Basri (2013) bahwa suatu anggaran yang dilakukan pada tahap perencanaan akan terdistribusi sesuai dengan kebutuhan lembaga pengelola penyusun anggaran. Distribusi gambaran belanja barang di Polres Sibolga dapat dilihat pada tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja**  
**Barang Polres Sibolga Tahun 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	BELANJA BARANG				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran	19,000,000	19,000,000	100	0
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Uang makan Non Organik Polres dan Polsek)	352,940,000	351,646,000	99.63	1,294,000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,320,000	113,320,000	100	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya	7,347,726,000	7,194,956,000	97.92	152,770,000
	JUMLAH	7,832,986,000	7,678,922,000	98.03	154,064,000
2	Belanja Barang Non Operasional (Honor Supveyor data Komplapin)	19,800,000	14,400,000	72.73	5,400,000
	Belanja Honor Output Kegiatan				
	JUMLAH	19,800,000	14,400,000	72.73	5,400,000
3	Belanja Barang Persediaan	261,200,000	261,200,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	JUMLAH	261,200,000	261,200,000	100	0
4	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	195,110,000	193,788,427	99.32	1,321,573
	Belanja Langganan Telepon	13,546,000	13,462,944	99.39	83,056
	Belanja Langganan Air	22,578,000	21,641,570	95.85	936,430
	JUMLAH	231,234,000	228,892,941	98.99	2,341,059
5	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245,200,000	245,200,000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	426,009,000	426,009,000	100	0
	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	0	0		0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	2,344,768,000	2,339,402,000	99.77	5,366,000
	Mesin (Pengadaan BMP Polres/Polsek /Pol Air)				
	JUMLAH	3,015,977,000	3,010,611,000	99.82	5,366,000
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	242,295,000	242,285,000	100	10,000
	Belanja Perjalanan Biasa				
	JUMLAH	242,295,000	242,285,000	100	10,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	11,603,492,000	11,436,310,941	98.56	167,181,059

*Sumber* : (Kabagren, 2020)

Pada belanja modal pada Pagu Polres Sibolga dengan anggaran sebesar Rp 230,183,000 dan realisasi sebesar Rp 226,150,227 dengan penyerapan penggunaan anggaran mencapai 98.25% atau sisa 1.75%. Dari hasil yang diperoleh pada tahun 2016 dan 2017, dimana pada realisasi anggaran belanja modal pada Pagu Polres Sibolga tidak mengalami kesejangan/kesenjangan anggaran atau dapat dikatakan anggaran dan realisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penyusunan anggaran. Pada tabel 4.7 selanjutnya akan dibahas realisasi terhadap

penggunaan anggaran berdasarkan hasil analisis pada Pagu Polres Sibolga pada tahun 2018 yang akan disajikan pada bagian berikut ini.

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2018**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	32,198,000	32,197,600	100	400
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	3,000	864	28.8	2,136
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	3,220,000	3,219,760	99.99	240
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	562,000	552,576	98.32	9,424
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2,463,000	2,462,280	99.97	720
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	8,470,000	8,470,000	100	0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2,520,000	2,520,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>49,436,000</b>	<b>49,423,080</b>	<b>99.97</b>	<b>12,920</b>
2	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	7,940,135,000	7,936,840,600	99.99	3,294,400
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	200,000	157,323	78.76	42,677
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	527,762,000	527,761,780	100	220
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	165,972,000	165,970,622	100	1,378
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	473,010,000	473,010,000	100	0
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	83,487,000	83,485,933	100	1,067
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	596,423,000	596,291,796	100	131,204
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	4,562,780,000	4,560,920,000	100	1,860,000
	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	10,052,000	10,050,000	99.98	2,000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	20,402,000	20,400,000	99.99	2,000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	3,000	0	0	3,000
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	151,950,000	151,875,000	100	75,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>14,532,176,000</b>	<b>14,526,763,054</b>	<b>100</b>	<b>5,412,946</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,581,612,000</b>	<b>14,576,186,134</b>	<b>100</b>	<b>5,425,866</b>

*Sumber* : (Kabagren, 2020)

Tabel 4.7 dapat dilihat anggaran pada belanja pegawai pada Pagu Polres Sibolga pada tahun 2018 sebesar Rp 14,581,612,000 dan realisasi sebesar Rp 14,576,186,134 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.96%. Tahun 2018 pada Pagu Polres Sibolga tidak mengalami kesejangan anggaran, artinya dana yang terealisasi sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Semakin besar belanja terealisasi dari yang dianggarkan maka akan semakin kecil sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir tahun begitu

juga sebaliknya semakin kecil belanja yang terealisasi maka sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir tahun akan besar walaupun pembiayaan netto juga mempengaruhi nilai sisa lebih pembiayaan anggaran.

Tabel 4.4 pada belanja barang, anggaran Pagu Polres Sibolga sebesar Rp 13,276,137,000 dan realisasi sebesar Rp 13,274,463,009 dengan penyerapan anggaran mencapai 99.99%. secara umum pada belanja barang cenderung tidak mengalami kesejangan atau kesenjangan, belanja barang masih sama tiap tahunnya dari tahun 2015, 2016, 2017 atau 2018. Anggaran belanja modal yang dialokasi pada Pagu Polres Sibolga meliputi honor output kegiatan, perawatan kendaraan bermotor, perbaikan peralatan fungsionaris, pengadaan dan perbaikan peralatan kantor, belanja dan perawatan peralatan operasional kepolisian. Selanjutnya dapat dilihat tabel distribusi anggaran dan realisasi pada tahun 2019 (Tabel 4.5). Menurut Hedi Syahputra Hasibuan/Ps. Paurprogar Bagren dan Kabagren (2020), pada belanja pegawai 2018 tidak terjadi kesenjangan di Satuan Kerja Polres Sibolga, artinya jumlah yang direncanakan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat realisasi anggaran. Realisasi anggaran belanja barang di Satuan Kerja Polres Sibolga dapat dilihat pada tabel 4.8

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja**  
**Barang Polres Sibolga Tahun 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	<b>BELANJA BARANG</b>				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran	11,000,000	11,000,000	100	0
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Makan & Wat Tahanan)	347,890,000	347,880,000	100	10,000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97,760,000	97,760,000	100	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Giat Lidik laka Sat Lantas )	8,365,226,000	8,364,890,000	100	336,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,821,876,000</b>	<b>8,821,530,000</b>	<b>100</b>	<b>346,000</b>
2	Belanja Barang Non Operasional Belanja Honor Output Kegiatan	14,400,000	14,400,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>14,400,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
3	Belanja Barang Persediaan	333,972,000	333,972,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	<b>JUMLAH</b>	<b>333,972,000</b>	<b>333,972,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
4	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	397,310,000	396,219,000	100	1,091,000
	Belanja Langganan Telepon	14,036,000	14,036,000	100	0
	Belanja Langganan Air	52,578,000	52,575,195	99.99	2,805
	<b>JUMLAH</b>	<b>463,924,000</b>	<b>462,831,009</b>	<b>99.76</b>	<b>1,092,991</b>
5	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,000,000	156,000,000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	650,631,000	650,631,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,593,039,000	2,593,039,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,399,670,000</b>	<b>3,399,670,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Binsas	242,295,000	242,060,000	99.9	235,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>242,295,000</b>	<b>242,060,000</b>	<b>99.9</b>	<b>235,000</b>
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>13,276,137,000</b>	<b>13,274,463,009</b>	<b>99.99</b>	<b>1,673,991</b>

Sumber : (Kabagren, 2020)

Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa belanja barang pada Polres Sibolga yaitu barang operasional, keperluan kantor, pengadaan bahan makanan (makan dan wat tahanan), honor operasional satuan kerja, barang persediaan, jasa (listrik, telepon dan air), biaya pemeliharaan gedung dan bangunan dan perjalanan biasa. Pada belanja barang, dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 13.276.137.000 dan realisasi Rp 13.274.463.009, artinya anggaran yang terserap sebesar 99.99%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada belanja barang tidak terjadi kesenjangan pada satuan kerja Polres Sibolga.

Pada tahun 2019 adalah tahun akhir yang digunakan oleh peneliti untuk melihat realisasi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan

belanja modal di Satuan Kerj Polres Sibolga, uraian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Polres Sibolga Tahun 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
1	<b>BELANJA PEGAWAI</b>				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	35,580,000	35,579,700	100	300
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	2,000	221	16.55	1,779
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	3,559,000	3,557,970	99.97	1,030
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	564,000	563,148	99.85	852
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2,390,000	2,389,860	99.99	140
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	8,330,000	8,330,000	100	0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2,520,000	2,520,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>52,945,000</b>	<b>52,940,899</b>	<b>99.99</b>	<b>4,101</b>
2	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	8,154,709,000	8,154,708,700	100	300
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	144,000	123,321	99.76	20,679
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	537,942,000	537,940,570	100	1,430
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	172,999,000	172,998,538	100	462
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	483,090,000	483,090,000	100	0
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	69,406,000	69,405,125	100	875
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	582,590,000	582,589,932	100	68
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	4,438,080,000	4,438,080,000	100	0
	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	8,501,000	8,500,000	99.99	1,000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	20,101,000	20,100,000	100	1,000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	2,000	0	0	2,000
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	145,650,000	145,650,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>14,613,214,000</b>	<b>14,613,186,186</b>	<b>100</b>	<b>27,814</b>
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	<b>14,666,159,000</b>	<b>14,666,127,085</b>	<b>100</b>	<b>31,915</b>

Sumber : (Kabagren, 2020)

Tabel 4.9 anggaran belanja pegawai pada Pagu Polres Sibolga sebesar Rp 14,666,159,000 dan realisasi sebesar Rp 14,666,127,085 dengan penyerapan anggaran mencapai 99.89%. Artinya pada tahun 2018 dan 2019 tidak mengalami kesejangan atau kesenjangan pada belanja pegawai Pagu Polres Sibolga. Hal ini dikarenakan tidak setiap tahun ada pegawai yang naik pangkat, mutasi personil, personil yang meninggal.

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Penggunaan Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran**  
**Belanja Barang dan Modal Polres Sibolga Tahun 2019**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
1	2	4	5	6	7
I	<b>BELANJA BARANG</b>				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran	0	0		0
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	370,410,000	370,410,000	100	0
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	138,320,000	134,600,000	97.31	3,720,000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	10,360,002,000	10,351,883,000	99.92	8,119,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>10,868,732,000</b>	<b>10,856,893,000</b>	<b>99.89</b>	<b>11,839,000</b>
	Belanja Barang Non Operasional				
	Belanja Honor Output Kegiatan	14,400,000	14,400,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>14,400,000</b>	<b>14,400,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Barang Persediaan				
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	289,240,000	289,240,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>289,240,000</b>	<b>289,240,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	406,110,000	406,109,374	100	626
	Belanja Langganan Telepon	20,386,000	20,386,000	100	0
	Belanja Langganan Air	52,578,000	52,578,000	100	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>479,074,000</b>	<b>479,073,374</b>	<b>100</b>	<b>626</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147,200,000	147,200,000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	660,901,000	660,901,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan BMP)	2,393,039,000	2,387,867,000	99.78	5,172,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,201,140,000</b>	<b>3,195,968,000</b>	<b>99.84</b>	<b>5,172,000</b>
	<b>JUMLAH BELANJA BARANG</b>	<b>15,094,881,000</b>	<b>15,077,869,374</b>	<b>99.89</b>	<b>17,011,626</b>
53	<b>BELANJA MODAL</b>				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,199,000	8,199,000	100	0
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>8,199,000</b>	<b>8,199,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Sumber : (Kabagren, 2020)

Tabel 4.10 pada anggaran belanja barang dengan anggaran sebesar Rp 15,094,881,000 dan realisasi sebesar Rp 15,077,869,374 dengan penyerapan anggaran sebesar 99.89%. belanja barang tidak jauh berbeda dengan tahun tahun sebelumnya. Pada tabel 4.10 juga dapat dilihat belanja modal pada Pagu Polres Sibolga dengan anggaran sebesar Rp 8,199,000 dan realisasi sebesar Rp 8,199,000 atau 100% penggunaan anggaran. Dalam menetapkan pagu indikatif seharusnya merujuk pada laporan realisasi anggaran sebab pada laporan realisasi anggaranlah dapat memberikan informasi tentang realisasi anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan



antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa pada realisasi anggaran juga dapat diukur kinerja suatu satuan kerja seperti yang disyaratkan dalam sistem pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja.

#### **4.2.2. Kesenjangan Antara Realisasi dan Anggaran**

Menurut Suartana (2020:138) sering sekali Perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu-satunya pengukur kinerja manajemen, karena itu yang tersedia. Penekanan anggaran seperti ini dapat memungkinkan timbulnya *slack*. Penilaian kinerja berdasarkan tercapai atau tidaknya target anggaran akan mendorong bawahan untuk menciptakan *slack* dengan tujuan meningkatkan prospek kompensasi kedepannya. *Slack* anggaran adalah perbedaan antara anggaran yang dinyatakan dan estimasi anggaran terbaik yang secara jujur dapat diprediksikan.

Kesenjangan anggaran (*budgetary slack*) merupakan langkah pembuat anggaran untuk mencapai target yang lebih mudah dicapai dengan menggunakan pendapatan yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi dari estimasi terbaik mereka mengenai jumlah tersebut. Oleh karena itu, anggaran yang dihasilkan adalah target yang lebih mudah bagi mereka untuk dicapai.

Pada tabel 4.6 terlihat secara spesifik kesenjangan yang terjadi antara anggaran dan realisasi, oleh karena itu berikut merupakan selisih

belanja anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

**Tabel 4.11**  
**Selisih Anggaran dan Realisasi Pada Pagu Polres Sibolga**  
**(dalam Rupiah) Pada Tahun 2015-2019**

<b>Uraian Belanja</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
<b>Pegawai</b>	51.666.003.000	59.363.933.577	-7.697.930.577
<b>Barang</b>	45.013.613.000	43.889.997.663	1.123.615.337
<b>Modal</b>	268.382.000	264.171.954	4.210.046
<b>Hibah</b>	1.350.000.000	1.350.000.000	0

*Sumber: (Kabagren, 2020)*

Selisih antara anggaran dan realisasi anggaran pada satuan kerja Polres Sibolga pada kurun waktu 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 pada uraian belanja pegawai diperoleh hasil selisih antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan hasil realisasi selama periode tersebut diperoleh hasil pagu minum sebesar -15% atau sebesar (-7.697.930.577). Selisih pagu Polres Sibolga yang terjadi yang diakibatkan oleh adanya proses kenaikan pangkat anggota Polres Sibolga yang selalu terjadi dilingkungan Polres Sibolga. Mutasi dan kenaikan jabatan ini terjadi tidak menentu setiap tahunnya, sehingga tidak dapat diprediksi beberap anggota yang akan mengalami mutasi dan berapa posisi jabatan yang akan mengalami kenaikan pangkat. Anggota yang mengalami mutasi dan kenaikan pangkat akan langsung mendapatkan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji sesuai dengan jabatan atau pangkat terbaru sehingga akan mengalami peningkatan jumlah yang diterima.

Selisih antara anggaran dan realisasi belanja barang Polres Sibolga tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 diperoleh nilai selisih sebesar 2% atau sebesar Rp 1.123.615.337. Selisih antara anggaran dan realisasi hibah pada satuan kerja Polres Sibolga tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 diperoleh hasil selisih nilai sebesar 2% atau sebesar Rp 4.210.046.

#### **4.2.3. Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Anggaran**

Kesenjangan antara anggaran dan realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah pada anggaran pemerintah daerah kesenjangan anggaran dapat disebabkan oleh adanya pelaku oportunistik di Organisasi Perangkat Daerah. Perilaku Oportunistik tersebut meliputi mengusulkan kegiatan yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas, mengusulkan kegiatan yang memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar, dan memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya. Besarnya anggaran pada pos belanja memicu adanya penciptaan senjangan anggaran oleh pihak tertentu.

Kesenjangan anggaran juga dapat disebabkan oleh informasi yang tidak sinkron atau komunikasi yang kurang baik antar pihak yang berkaitan atau bersangkutan dengan pengelola keuangan. Misalnya adanya informasi yang beraneka ragam dari bawahan dengan atasan. Bawahan cenderung akan melonggarkan anggaran yang disusun agar mudah dalam pencapaiannya.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Kesenjangan Anggaran dan Realisasi Belanja pada Satuan Kerja Polres Sibolga**

Penyebab utama terjadinya kesejangan atau kesenjangan antara anggaran dan realisasi di Pagu Polres Sibolga adalah pada realisasi belanja pegawai. Menurut Kabagren Nababan, S.H./ Kabag ren Polres Sibolga bahwa kesenjangan realisasi anggaran belanja pegawai terjadi pada tahun 2015 mencapai -43.05%, tahun 2016 sebesar -3.54% dan tahun 2017 sebesar -8.31%. Kesenjangan belanja pegawai disebabkan faktor berikut ini (a) terjadinya mutasi personil; (b) kenaikan pangkat personel kepolisian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.; (c) kenaikan gaji berkala; (d) tanggungan bertambah karena adanya penambahan dan pengurangan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; (d) personil yang sudah menikah; atau (e) adanya personil yang meninggal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran antara lain dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga faktor-faktor internal dari pengguna anggaran. Upaya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran antara lain dengan perbaikan kelembagaan, perbaikan bisnis proses, penataan sumber daya manusia hingga perbaikan penghasilan/remunerasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama yang berhubungan dengan proses penyerapan anggaran.

Jumlah dari pengurangan maupun penambahan personil Polres Sibolga setiap tahunnya tidak dapat ditentukan, karena tergantung pada mutasi yang keluar. Dampak dari adanya kenaikan pangkat anggota tentu akan adanya penambahan gaji yang otomatis akan berpengaruh pada pagu kesejangan anggaran pada belanja pegawai. Karena belanja pegawai yang dianggarkan dihitung dari jumlah personil Polres Sibolga pada saat penyusunan anggaran, sehingga ketika adanya penambahan personil maupun kenaikan jabatan setelah anggaran dibuat maka akan terjadi pagu kesejangan anggaran.

Selain itu dari hasil wawancara dengan Hedi Syahputra Hasibuan/ Ps. Paurprogar Bagren diperoleh informasi tambahan bahwa pada belanja pegawai di Polres Sibolga, dimana pada saat disusun rencana anggaran sudah dihitung dari jumlah personil Polres Sibolga. Sehingga kesenjangan atau kesejangan anggaran dikarenakan faktor tidak terduga seperti yang dikatakan Kabagren Nababan, S.H./ Kabag ren Polres Sibolga sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Dewi Khairani, S.H/ Brigadir Bagren, bahwa anggaran pada Polres Sibolga khusus belanja pegawai dianggarkan namun karena dinamika pegawai yang menyebabkan kesejangan belanja pegawai. Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran satuan kerja.

Menurut Hedi Hasibuan Staf Personil Satuan Kerja Polres Sibolga bahwa faktor penyebab dari permasalahan pagu kesejangan yang terjadi di

Satuan Kerja Polres Sibolga adalah Pagu kesejangan Belanja Pegawai, pagu kesejangan pada belanja pegawai disebabkan pada saat penyusunan pagu Polres Sibolga personil yang dipergunakan yakni personil riil yang ada di Polres Sibolga. Namun akibat mutasi akan ada penambahan personil, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala. Selain itu, tunjangan umum TNI/Polri kebijakan baru yang berkaitan dengan kenaikan pangka, sehingga biaya yang dianggarkan berlebih pada saat realisasi.

Menurut Dewi Khairani, S.H/Brigadir Bagren (2020), kesenjangan juga terjadi dikarenakan kenaikan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dengan keadaan riil yang ada dan disesuaikan dengan adanya ketentuan dan ketetapan baru yang mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima, sehingga anggaran yang dibutuhkan juga mengalami peningkatan. Hal senada dikatakan oleh (Kabagren, 2020), kenaikan pangkat paling banyak terjadi di tahun 2015 sehingga ini yang menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran belanja pegawai terjadi karena personel yang mengalami kenaikan pangkat akan mendapatkan gaji dan tunjangan yang baru sesuai dengan pangkat dan tentu jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelumnya.

#### **4.3.1.a. Faktor Kesejangan/Kesenjangan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

Bentuk kompensasi pemerintah yang diberikan kepada pegawai pemerintah yaitu belanja pegawai. Adapun bentuk kompensasi belanja

pegawai berupa uang atau barang. Belanja pegawai yaitu bentuk dari hasil kinerja yang telah diselesaikan oleh pegawai pemerintahan, kemudian diterima dalam bentuk pemasukan rutin dan dilakukan pembayaran secara langsung melalui rekening-rekening pegawai atau lembaga yang bersangkutan. Anggaran belanja pegawai dalam yang disalurkan kemudian akan dilakukan pelaporan terhadap penggunaan realisasi anggaran tersebut. Tetapi dilapangan, belanja pegawai terkadang dapat kesejangan dan surplus termasuk di Polres Sibolga. Untuk itu perlu dikaji penyebab terjadi kesejangan dan surplus terutama pada belanja pegawai yang akan di jabarkan pada Tabel 4.12.

**Tabel 4.12**  
**Perkembangan Kesejangan dan Surplus Belanja Pegawai**  
**Tahun Anggaran 2015-2019 di Polres Sibolga**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran - Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Selisih	Keterangan
2015	10,230,526,000	14,634,354,883	-4,403,828,883	143.05	-43.05	Minus
2016	14,969,063,000	15,498,497,140	-529,434,140	103.54	-3.54	Minus
2017	13,447,277,000	14,564,954,469	-1,117,677,469	108.31	-8.31	Minus
2018	14,581,612,000	14,576,186,134	5,425,866	99.96	0.04	Surplus
2019	14,666,159,000	14,666,127,085	31,915	100	0	Surplus
Jumlah	67,894,637,000	73,940,119,711	-6,045,482,711			

Tabel 4.12 pada Pagu Polres Sibolga menunjukkan bahwa terdapat kesejangan/kesejangan dan surplus pada belanja pegawai. Jika dilihat kesejangan anggaran dan realisasi terjadi di tahun 2015, 2016 dan 2017. Penyebab tersebar terjadinya kesejangan anggaran terutama tertinggi ditahun 2015 sebesar -43,0% adalah mutasi pegawai, kenaikan pangkat, adanya personil Polres Sibolga yang menikah, bantuan dana dukacita, penambahan

personil baru di lingkungan Polres Sibolga. Pada tahun 2016 kesejangan belanja pegawai sebesar -3,54% dan tahun 2017 kesejangan sebesar -8,31% mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan kesejangan anggaran di Polres Sibolga. Ini dikarenakan realisasi yang diterjadi dalam belanja pegawai terdistribusi dengan baik dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan surplus belanja pegawai terjadi pada tahun 2018 dan 2019, ini mengindikasikan telah sesuai antara realisasi dan anggaran. Tingkat efektivitas belanja sesuai dengan anggaran menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif. Pada belanja modal tidak mengalami kesenjangan pada Polres Sibolga dikarenakan belanja modal berupa pembelian mesin dan peralatan, dimana tidak setiap tahun dilakukan pembelian mesin atau peralatan. Sehingga pada belanja modal dikatakan surplus anggaran.

#### **4.3.1.b. Faktor Surplus Anggaran dan Realisasi Belanja Barang**

Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang telah habis dipakai untuk melakukan produksi barang dan jasa kemudian dilakukan tidak dipasarkan. Belanja barang dapat berupa belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Adapun perkembangan surplus belanja barang pada Pagu Polres Sibolga yang terjadi ditahun 2015-2017 akan dijabarkan dalam tabel 4.9 berikut ini.



**Tabel 4.13**  
**Perkembangan Surplus Belanja Barang di Polres Sibolga**  
**Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran - Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Selisih	Keterangan
2015	7,631,191,000	7,515,313,000	115,878,000	98.48	1.52	Surplus
2016	12,034,038,000	11,210,504,348	823,533,652	93.16	6.84	Surplus
2017	11,603,492,000	11,436,310,941	167,181,059	96.58	3.42	Surplus
2018	13,276,137,000	13,274,463,009	1,673,991	99.99	0.01	Surplus
2019	15,094,881,000	15,077,869,374	17,011,626	99.89	0.11	Surplus
Jumlah	59,639,739,000	58,514,460,672	1,125,278,328			

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel belanja barang pada Pagu Polres Sibolga dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 belanja barang mengalami surplus anggaran. Belanja barang pada Pagu Polres Sibolga meliputi honor output kegiatan, perawatan kendaraan bermotor, perbaikan peralatan fungsionaris, pengadaan dan perbaikan peralatan kantor, belanja dan perawatan peralatan operasional kepolisian. Secara berurutan surplus Polres Sibolga pada tahun 2015 sebesar 1,52%, tahun 2016 sebesar 6,84%, tahun 2017 sebesar 3,42%, tahun 2018 sebesar 0,01% dan tahun 2019 sebesar 0,11%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran belanja barang telah optimal disusun dan terealisasi dengan baik pada tiap tahun anggaran di Polres Sibolga.

#### **4.3.1.c. Faktor Surplus Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya dapat menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode, yang didalamnya yaitu pengeluaran biaya untuk pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat dan mampu meningkatkan

kapasitas asset. Adapun yang termasuk dalam belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal fisik lainnya. Perkembangan belanja modal pada Pagu Polres Sibolga akan dijabarkan pada tabel 4.14

**Tabel 4.14**  
**Perkembangan Surplus Belanja Modal Polres Sibolga**  
**Tahun Anggaran 2015-2019**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran - Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Selisih	Keterangan
2015	0	0	0	0	0	-
2016	30,000,000	29,822,727	177,273	99.41	0.59	Surplus
2017	230,183,000	226,150,227	4,032,773	98.25	1.75	Surplus
2018	0	0	0	0	0	-
2019	8,199,000	8,199,000	0	100	0	Surplus
Jumlah	268,382,000	264,171,954	4,210,046			

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa belanja modal pada Pagu Polres Sibolga dari tahun 2016, 2017 dan 2019 mengalami surplus belanja pegawai. Secara berurutan selisih belanja modal pada tahun 2016 sebesar 0,59%, tahun 2017 sebesar 1,75%. Pada tahun 2015 dan 2018 pada Pagu Polres Sibolga tidak dianggarkan belanja modal dikarenakan anggaran dalam sistemnya top down, belanja modal ditentukan oleh kepolisian daerah. Tidak semua pengajuan yang dilakukan oleh Polres Sibolga disetujui oleh pusat, tergantung kebutuhan yang paling mendesak akan menjadi prioritas.

Menurut Kabagren Nababan, S.H./ Kabag ren, kerangka yang dilakukan dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pada satuan Polres Sibolga yaitu sistem akuntansi keuangan pada Polres Sibolga dimulai

dari melakukan menginput / mengentri data atau dokumen sumber pada setiap satuan kerja baik berupa DIPA, revisi DIPA, SPPD dan SPM, dll. Setelah dokumen sumber itu di input, kemudian diproses melalui posting (dokumen sumber dikelompokkan Ke dalam masing-masing kelompok / kegiatan) sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang akurat dan akuntabilitas.

Sehingga dari hasil wawancara yang dilakukan pada responden dalam penelitian ini bahwa perlu perbaikan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Pagu Polres Sibolga. Dalam penyusunan LRA juga harus memperhatikan khusus pada masalah anggaran dan revisi anggaran yang sering menjadi kendala di lapangan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar satuan kerja dan berkoordinasi di Polres Sibolga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hedi Syahputra Hasibuan/ Ps. Paurprogar Bagren bahwa laporan rencana anggaran merupakan Laporan realisasi anggaran yang dimuat di suatu aplikasi yang dihimpun di Bagren. Sedangkan menurut Dewi Khairani, S.H/ Brigadir Bagren bahwa tidak terdapat aturan khusus yang mengatur penyusunan LRA di Polres Sibolga. Berbeda dengan pendapat Kabagren Nababan, S.H./ Kabag ren bahwa aturan keuangan pada Polres Sibolga mengikuti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Sehingga penyusunan keuangan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pusat.

Sedangkan dalam perencanaan anggaran dijelaskan dalam UU No 25 tahun 2004 yaitu tindakan masa depan yang tepat dengan urutan pilihan yang tepat dan perhitungan sumber daya yang tepat. Dimulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai hasil akhirnya yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ketika DIPA disusun sesuai dengan perencanaan yang efektif, efisien dan proporsional maka penyerapan anggaran akan mengikuti pola seperti yang tertera dalam DIPA tersebut.

Menurut Kabagren Nababan, S.H./ Kabag ren, kendala dalam proses realisasi anggaran 5 tahun terakhir yang paling dominan adalah kesejangan/kesenjangan pada belanja pegawai di Pagu Polres Sibolga. Kesenjangan terjadi pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Penyebab terjadi kesenjangan terbesar yaitu jumlah pengurangan atau penambahan personil Polres Sibolga setiap tahunnya tidak bisa ditentukan tergantung mutasi yang keluar. Ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Hedi Syahputra Hasibuan/ Ps. Paurprogar Bagren bahwa faktor lain yang menjadi penyebab terjadi pagu kesejangan yaitu adanya kebijakan baru yang diberlakukan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat pengabdian yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka pagu kesejangan anggaran belanja pegawai.

Data jumlah penambahan dan pengurangan anggota pada Satuan Kerja Polres Sibolga mengapa pagu anggaran belanja kesejangan/kesenjangan menurut Kabagren Nababan, S.H./ Kabag ren diatur

dalam Pagu yang di usulkan berdasarkan KU. 107 dan 106 pada bulan Berjalan, tetapi pada tahun berikutnya terdapat penambahan personil dan kenaikan pangkat, itu yg menyebabkan pagu kesejangan/kesenjangan. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari jawaban kuesioner responden mengindikasikan bahwa sudut pandang para pengelola anggaran adalah masih bagian dari internal satker. Para pengelola anggaran menganggap bahwa standar audit intern adalah standar yang hanya menjadi formalitas dan tidak mempunyai korelasi dengan hasil audit intern itu sendiri.

#### **4.3.2. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kesenjangan**

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan dan pencegahan agar tidak terjadi kesejangan/kesenjangan anggaran ialah dengan melakukan revisi anggaran. Revisi anggaran merupakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan anggaran pada tahun dianggarkan dan disahkan dalam daftar isian pada pelaksanaan anggaran tahaun dianggarkan tersebut.

Cara penyelesaian pagu kesejangan realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden yaitu Kabagren Nababan, S.H./ Kabag rend, Hedi Syahputra Hasibuan/ Ps. Paurprogar Bagren dan Dewi Khairani, S.H/ Brigadir Bagren disimpulkan bahwa solusi terbaik adalah dengan mengajukan revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk menyelesaikan permasalahan pagu kesejangan DIPA sesuai ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran. Selain itu juga, muncul pertanyaan

dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya pagu keseimbangan realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga, Kabagren Nababan, S.H./ Kabag rend an Dewi Khairani, S.H/ Brigadir Bagren mengatakan bahwa terjadinya penurunan volume keluaran (output) teknis non teknis. Hasil jawaban berbeda dikemukakan oleh Hedi Syahputra Hasibuan/ Ps. Paurprogar Bagren bahwa dampak yang ditimbulkan tidak ada.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan anggaran dengan cara *self blocking*. Tahapan untuk penerapan *self blocking* di Polres Sibolga dilakukan pada awal perencanaan anggaran sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesenjangan anggaran. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengajukan revisi Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran bahwa revisi anggaran terdiri dari:

1. Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah merupakan perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan pagu belanja bagian anggaran Kementrian/Lembaga serta Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) termasuk pergeseran rincian anggarannya.

2. Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap merupakan peribahan rincian belanja bagian anggaran Kementrian /Lembaga dan atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1

(satu) program yang sama atau antara program dalam 1 (satu) bagian anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang tidak menyebabkan penambahan pengurangan pagu belanja.

### 3. Revisi administrasi.

Revisi administrasi meliputi revisi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran dan atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administrasi. Penanggulangan kesejangan anggaran ialah tetap melakukan pembayaran terhadap kesejangan anggaran sampai dengan dilakukannya pengesahan revisi anggaran. Kesejangan anggaran dilampirkan kepada bagian perencanaan Polda Sumut dan melakukan Revisi Anggaran yang kesejangan tersebut.

#### **4.3.3. Alur Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran Di Satuan Kerja Polres Sibolga**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan data awal untuk mengetahui penyerapan anggaran yang dilakukan fungsi-fungsi di Satuan Polres Sibolga. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga/institusi sebagai pengemban fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, amanat Undang-Undang tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

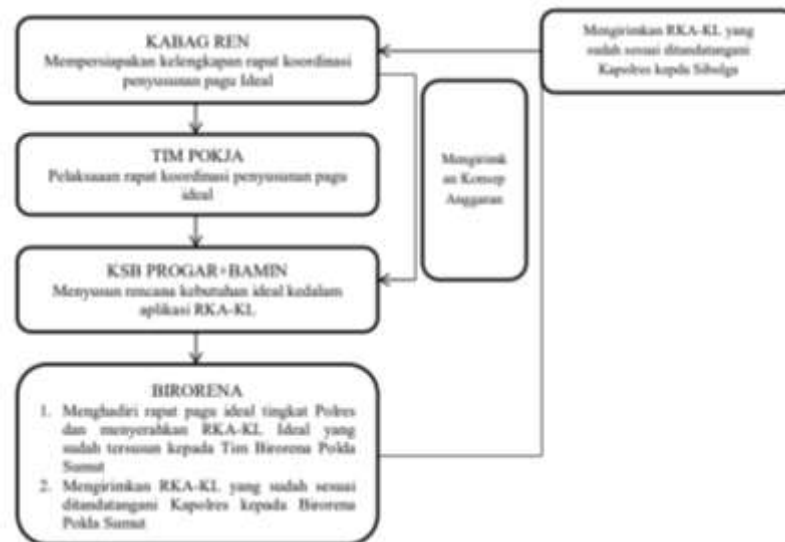
Reformasi pengelolaan keuangan negara diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal ini membawa banyak perubahan dalam sistem dan proses pengelolaan keuangan negara diantaranya adalah pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) yang intinya dititik beratkan pada aspek kinerja dengan capaian output yang jelas dan terukur serta normalisasi penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran yang baik seharusnya sesuai dengan rencana kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RDP) sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan anggaran pengembalian fungsi perencanaan harus memperhatikan capaian target realisasi anggaran, mengingat pemerintah menerapkan penghargaan dan sanksi dibidang anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tata cara pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan kriteria persentase penyerapan anggaran minimal 95%, persentase capaian output minimal 95%, laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Dewi Khairani, S.H/ Brigadir Bagren diketahui bahwa alur dan tata cara pelaksanaan LRA pada Satuan Kerja Polres Sibolga yaitu SPM/SP2D dihimpun dan dilakukan penginputan pada aplikasi SMAP Offline (sistem manajemen anggaran polri). Sedangkan alur tahapan Laporan



Rencana Anggaran (LRA) pada Pagu Polres Sibolga dapat dilihat pada Gambar 4.1.



**Gambar 4.1. Alur LRA Pagu Polres Sibolga**

*Sumber : Polres Sibolga, 2020*

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alatpenilaian kinerja berdasarkan indikator–indikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bertujuan menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja untuk mewujudkan *good govemence*. Adapun tujuan disusunnya standar operasional prosedur ini adalah untuk dijadikan pedoman tentang prosedur dan tata cara Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Polres Sibolga.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Polres Sibolga ini mencakup segala kegiatan yang menunjang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Bag Ren, baik personel dan peralatan disusun dengan sistematis.

Aspek Dukungan Anggaran yang digunakan mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan pelaksanaan, tahapan pengawasan dan pengendalian secara keseluruhan didukung /menggunakan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyusun Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut ini.

- a. Acuan Penyusunan
- b. Rencana Kerja Polres
- c. Kertas Kerja RKA-KL
- d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- e. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Prosedur yang dilakukan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut :

- a. Mendatakan anggaran yang telah didistribusikan ke Subsatker jajaran
- b. Melaksanakan Rekapitulasi anggaran yang telah di serap
- c. Kirim ke Polda untuk laporan pada satuan atas.

Langkah-langka dasar monitoring evaluasi anggaran dilingkungan satker polres (tiap bulan): 1) membuat sprin pelaksanaan monitoring, yang telah disahkan oleh kasat ker guna disampaikan sebagai bahan pemberitahuan kepada yang terlibat dalam kegiatan monitoring tersebut. 2) meminta kepada para pengguna anggaran berupa laporan hasil atas pelaksanaan kegiatan guna menganalisa dan mengevaluasi anggaran sebagai bahan pengawasan anggaran. 3) membuat laporan mengenai kegiatan monitoring evaluasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana giat/subsatker serta memberi masukan kepada subsatker untuk menjadi bahan pertimbangan subsatker dimasa yang akan datang. 4) mencatat hasil dari monitoring atas pelaksanaan program- program yang

telah dilaksanakan dan anggaran yang telah digunakan oleh masing-masing subsatker polres guna sebagai bahan laporan kepada satuan atas/polda.

#### **4.4.Rangkuman Pembahasan**

Analisis anggaran dan realisasi anggaran pada Pagu Polres Sibolga ditemukan beberapa permasalahan terjadinya kesejangan/kesenjangan terutama pada belanja pegawai. Adapun yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Temuan di lapangan berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui kesejangan/kesenjangan terbesar Polres Sibolga pada anggaran dan realisasi belanja pegawai. Kesejangan/kesenjangan tertinggi terjadi pada tahun 2015 mencapai -43.05%. Anggaran belanja pegawai pada tahun 2015 sebesar RP 10.230.526.000 dan realisasi sebesar Rp 14.634.354.883 dan selisih sebesar (Rp 4.403.828.883). Akan tetapi terjadi penurunan yang cukup baik di tahun 2016 sebesar -3.54% dan di tahun 2017 sebesar -8.31.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesejangan/kesenjangan anggaran belanja yaitu pada belanja pegawai disebabkan oleh beberapa faktor seperti mutasi pegawai, kenaikan pangkat, adanya personil Polres Sibolga yang menikah, bantuan dana dukacita, penambahan personil baru di lingkungan Polres Sibolga. Sedangkan belanja modal dan belanja barang Pagu Polres Sibolga dari tahun 2015,2016, 2017, 2018 dan 2019 disimpulkan surplus. Ini mengindikasikan bahwa anggaran dan realisasi telah optimal

disusun dan terealisasi dengan baik pada tiap tahun anggaran di Polres Sibolga.

3. Upaya yang dilakukan agar kesejangan/kesenjangan pada anggaran belanja pegawai dapat di lakukan yaitu dengan perbaikan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) pada Pagu Polres Sibolga Dalam penyusunan LRA juga harus memperhatikan khusus pada masalah anggaran dan revisi anggaran yang sering menjadi kendala di lapangan. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar satuan kerja dan berkoordinasi di Polres Sibolga.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneliitan dan pembahasan yang telah dilakukan Peneliti mengenai Laporan Realisasi Anggaran di Satuan Kerja Polres Sibolga, maka dapat diambil kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Polres Sibolga dalam praktiknya melakukan pengelolaan keuangannya melalui beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses penyusunan dan pelaporannya, yaitu tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesejangan anggaran belanja pada satuan kerja Polres Sibolga ialah karena penyusunan anggaran untuk tahun depan disusun di tahun berjalan sehingga terjadi kesenjangan antara anggaran dengan realisasi, hal ini disebabkan oleh bertambahnya personel, kenaikan jabatan, adanya personel yang menikah, mutasi personel, kenaikan gaji sehingga belanja pegawai bertambah setelah disahkannya anggaran.
3. Upaya dalam penaggulangan terjadinya kesejangan anggaran ialah dengan melakukan revisi anggaran penyelesaian pagu

kesenjangan melalui *self blocking* dana cadangan untuk penyelesaian pagu kesenjangan belanja pegawai.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat implikasi yang diharapkan tentang anggaran dan realisasi yang dapat terlaksanakan dalam pelaksanaan laporan realisasi anggaran menerapkan berdasarkan alur dan tata cara Perencanaan Anggaran Keuangan dengan memperhatikan kebutuhan keuangan pada Satuan Kerja Polres Sibolga agar tidak terjadi kesenjangan pada anggaran dan realisasi keuangan Polres Sibolga. Terjadinya kesenjangan anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga dapat ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi laporan anggaran dan realisasi agar tidak terjadi pada anggaran dan realisasi keuangan pada periode selanjutnya dengan cara membuat perencanaan keuangan yang strategis.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi lembaga maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran tetpa dilakukan sesuai dengan alur dan tata cara yang ada, namun sebaiknya dimohonkan kepada Bapak Kapolres Sibolga tidak melakukan mutasi jabatan sebelum masa anggaran selesai.

2. Faktor-faktor penyebab dari kesejangan anggaran agar diperkecil pada setiap anggaran, mengevaluasi penyebab kesejangan anggaran tersebut pada setiap periode anggaran agar tidak terjadi kembali.
3. Agar tidak terjadi kembali kesejangan anggaran pada belanja pegawai, sebagianya pada saat penyusunan anggaran telah dipersiapkan anggaran tidak terduga sebagai anggaran cadangan ketika ada belanja diluar dari yang dianggarkan, serta memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi pada belanja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Abdul Halim, M. S. (2016). . *Toeri, Konsep Dan Aplikasi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.

Akuntansi, P. (2012). *Rudianto*. Jakarta: Erlangga.

Alexander Abe, 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pembaharuan

Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Darise, N. (2014). *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jakarta: Indeks.

Desiana, W. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerpaan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Akuntansi*, 2, -.

Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hertianti, D. N. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Lembaga Pembangunan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).

Listyangish. 2014. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*.BPFG Univesitas Gajah Mada.

Mahsun, M. (2010). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Malayu S.P Hasibuan. (2007). *Manajemen (Dasar, Pengertian Dan Masalah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Malayu S.P Hasibuan. (2012). *Manajemen SDM. Edisi Revisi*, Cetakan Ke. Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (37 ed.)*. Bandung: PT Remaaj Rosdakarya Offset.



- Munandar, M. (2011). *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja* (Edisi Kedua ed.). Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.
- Nafarin, M. (2013). *Penganggaran Perusahaan* (Ke-3, Cet. Ke-2 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Parulian, S. d. (2015). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Poerwandari, E. K. (2013). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia*. Bekasi: Lembaga Pembangunan Sarana Pengukuran Dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Prasetyo, G. E. (2010). *Peyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Akrual Pemerintahan Daerah*. Bogor.
- Ghalia. Sijarweni. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Barus Press.
- Sinaga, M. T. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Locus Of Control dan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Akuntansi, 1 No. 2 Seri A*
- Sri Rahayu, A. R. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokromidjojo Bintoro, 2010. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. PT. Gunung Agung
- Yaumi, M. (2014). *Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan Implementasi*. Jakarta: Perdana Media Group.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Darlina M, Yannizar, Hodijah S. 2019. *Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah 3 (4) : 257-268.
- Fajar N, Arfan M. 2017. *Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh*. Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi, 10(2) : 95-102.
- Fajar N, Abdul R. 2013. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai variabel intervening*. Diponegoro Journal of Accounting, 1(2) : 1-14
- Iswahyudin. 2019. *Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa terhadap sisa lebih pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah*. Jurnal Katalogis, 4 (6) : 152-168
- Miliasih, Retno.2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis. Universitas Indonesia.
- Sinaga, Mardongan Tua, 2013. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Locus Of Control dan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 2 (2013) Seri A Universitas Negeri Padang
- Sukadi .2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja Pada Akhir Tahun Anggaran*. Tesis-Abstrak. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.
- Wati Kadek Desiana, dkk. (2014). *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerpaan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi Program S1 Vol 2 Universitas Pendidikan Ganesha Bali
- Winter J,S. 2019. *Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Belanja Modal Terhadap Penetapan Pagu Indikatif Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai*. Jurnal Katalogis 5 (2) : 36-48
- Zarinah Monik, Dr. Darwanis, dan Dr. Abdullah, S. 2016. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas SDM terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kab Aceh Utara*.Jurnal Magister Akuntansi. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. pp.90-97.

### **Peraturan Peundang-Undangan**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Organisasi dan Tata Kerja Entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP/071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 177/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, Dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengsahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

### **Internet Dan Lainnya**

<http://eprints.polsri.ac.id/3341/3/BAB%20II.PDF> diakses 24 Juni 2020

Medan <http://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/> , akses 23 September 2020, Medan

Kabagren, N. (2019). *Laporan Anggaran Dan Realisasi Satuan Kerja Polres*. Bagian Perencanaan Polres Sibolga, Sumatera Utara

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

1. Nama : **LILY FACHRIZAL BATUBARA**
2. Tempat Tanggal Lahir: Medan, 05 desember 1980
3. Jenis Kelamin : Laki laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Sibolga-padangsidempuan Sibuluan Indah  
Pandan  
Tapteng
7. No. Hp : 081264334211
8. Email : ywin999@gmail.com

### Keluarga

1. Ayah : H. Fachruddin Batubara
2. Ibu : Hj. NH. Naipospos
3. Istri : Rike key lani, S.Pd
4. Anak I : Danish Bazlin batubara
5. Anak II : Fildzah Bahiyah Batubara
6. Anak III : Salim Baithar Batubara
7. Anak IV : Felisya behnaz batubara

### Pendidikan

1. SD Inpres no 064986 (1988-1993)
2. SMP N 11 (1994-1996)
3. SMA N 10 (1997-1999)
4. S1 N 10 (1997-1999)
5. S2 Umsu (2019-2020) Pascasarjana Magister Manajemen UMSU



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) - [www.pascasarjana.umsu.ac.id](http://www.pascasarjana.umsu.ac.id)

E-mail: [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id)

Nomor : 526 /II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Medan, 04 Rab. Akhir 1442 H  
20 November 2020 M

Kepada Yth :  
**Kepala Satuan Kerja Polres Sibolga**  
di  
Tempat.-

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Dengan hormat, dalam rangka penyelesaian studi dan peningkatan profesionalisme dan intelektualitas mahasiswa Program Studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mohon kiranya Saudara dapat memberikan izin melakukan riset pada institusi Saudara kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **LILY FACHRIZAL BATUBARA**  
NPM : 1820030079  
Prodi : Magister Manajemen/ Manajemen Keuangan  
Judul Tesis : ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PADA SATUAN KERJA  
POLRES SIBOLGA.

Perlu disampaikan bahwa informasi dan data yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan keperluan akademik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya terlebih dahulu diucapkan terima kasih, akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semua. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*



C.c File



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR SIBOLGA

Nomor : B / 1716 / XI / 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan permohonan izin riset.

Sibolga, 23 Nopember 2020

K e p a d a

Yth. DIREKTUR UNIVERSITAS  
MUHAMMADIAH SUMATERA UTARA  
PROGRAM PASCASARJANA

di

Tempat

1. Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima Nomor : 926/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020 tanggal 20 Nopember 2020 perihal permohonan izin riset atas nama :

Nama : LILY FACHRIZAL BATUBARA

NPM : 1820030079

Prodi : Magister Manajemen / Manajemen Keuangan

Perlu disampaikan bahwa Mahasiswa tersebut kami berikan izin untuk melaksanakan riset pada Institusi Satuan Kerja Polres Sibolga sebagai syarat penyusunan Tesis dengan judul :

**"ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PADA SATUAN KERJA POLRES SIBOLGA"**

2. Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA

TRİYADI, S.H., S.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081569

**DRAF WAWANCARA**  
**PADASATUAN KERJA POLRES SIBOLGA**  
**TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**  
**Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019**

**Identitas Informan I**

Nama : Kamaluddin Nababan, S.H.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli tengah, 11 Juni 1966  
 Umur : 54 Tahun  
 Pendidikan Terakhir Umum : Strata 1  
 Pendidikan Terakhir Kepolisian : Sektupa  
 Alamat : Jl. MS. Sianturi No. 37 Ke. Aek habil  
 Kec. Sibolga selatan  
 Jabatan : Kabag ren

**Jadwal Wawancara**

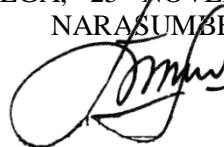
Hari/Tanggal : Rabu, 25 November 2020  
 Waktu : 10.00 Wib  
 Tempat : Jalan Dr. F. L. Tobing No. 35  
 Tujuan : Isi Riset Penelitian Tesis

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana kerangka pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Sistem akuntansi keuangan dimulai dari menginput / mengentri data atau dokumen sumber pada setiap satuan kerja baik berupa DIPA, revisi DIPA, SPPD dan SPM, dll. Setelah dokumen sumber itu di input, kemudian diproses melalui posting ( dokumen sumber dikelompokkan Ke dalam masing-masing kelompok / kegiatan ) sehingga menghasilkan suatu laporan keuangan yang akurat dan akuntabilitas.
2.	Apa yang Anda ketahui tentang LRA Satuan Kerja Polres Sibolga?	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
3.	Apakah yang menjadi tujuan LRA bagi Satuan Kerja Polres Sibolga?	Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
4.	Siapa sajakah yang turut terlibat dalam penyusunan LRA pada Satuan Kerja Polres	KOMPOL KAMALUDDIN NABABAN, S.H. BRIGADIR HEDI SYAHPUTRA HASIBUAN BRIPTU DEWI KHAIRANI, S.H.



	Sibolga?	
5.	Apakah terdapat aturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan dan akuntabilitas keuangan yang diterapkan pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.
6.	Apa saja yang menjadi dasar hukum dan pedoman dalam penyusunan LRA Satuan Kerja Polres Sibolga?	Dasar hukum penyusunan LRA pada satuan kerja polres sibolga yakni DIPA polres sibolga
7.	Bagaimana proses realisasi yang dijalankan Satuan Kerja Polres Sibolga terkait masalah/kendala untuk tahun pagu 5 (lima) tahun terakhir10.?	Masalah / kendala untuk LRA 5 tahun yang lalu adalah minus pada belanja pegawai
8.	Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pagu minus realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Pagu minus yang terjadi diakibatkan karena adanya penambahan dan pengurangan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, adanya kenaikan gaji atau tunjangan dalam kurun waktu yang bersangkutan, dan kenaikan pangkat personel kepolisian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
9	Bagaimana cara penyelesaian pagu minus realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Mengajukan revisi DIPA untuk menyelesaikan permasalahan pagu minus DIPA sesuai ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran
10.	Apakah dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya pagu minus realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	<i>terjadinya</i> penurunan volume keluaran (output) teknis non teknis

SIBOLGA, 25 NOVEMBER 2020  
NARASUMBER



KAMALUDDIN NABABAN, SH  
KOMISARIS POLISI NRP 66060476



---

**Identitas Informan II**

Nama : Hedi Syahputra Hasibuan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 20 September 1988  
Umur : 32 Tahun  
Pendidikan Terakhir Umum : SMA  
Pendidikan Terakhir Kepolisian : Diktuk  
Alamat : Kapten Tandean Blk Kel. Kota Baringin  
Kec. Sibolga Kota  
Jabatan : Ps. Paurprogar Bagren

---

**Jadwal Wawancara**

Hari/Tanggal : Rabu, 25 November 2020  
Waktu : 14.30 Wib  
Tempat : Jalan Dr. F. L. Tobing No. 35  
Tujuan : Isi Riset Penelitian Tesis

---

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang LRA Satuan Kerja Polres Sibolga?	LRA adalah Laporan realisasi anggaran yang dimuat di suatu aplikasi yang dihimpun di Bagren
2.	Apakah Anda mengetahui tentang permasalahan pagu minus yang terjadi dalam relaisasi anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga pada periode 5 (lima) tahun terakhir?	Permasalahan pagu minus yang terjadi di satuan kerja polres sibolga yakni pagu minus Belanja Pegawai
3.	Berapakah jumlah penambahan dan pengurangan anggota/pegawai untuk setiap tahun pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Jumlah pengurangan atau penambahan personil polres sibolga setiap tahunnya tidak bisa di tentukan tergantung mutasi yang keluar
4.	Berdasarkan data jumlah penambahan dan pengurangan anggota pada Satuan Kerja Polres Sibolga mengapa pagu anggaran belajana minus?	Pagu yang di usulkan berdasarkan KU. 107 dan 106 pada bulan Berjalan, tetapi pada tahun berikutnya terdapat penambahan personil dan kenaikan pangkat, itu yg menyebabkan pagu minus
5.	Berkaitan dengan mutasi atau kenaikan pangakt yan g juga menyebabkan pagu minus pada realisasi anggaran belanja pegawai, pakah Satuan Kerja Polres Sibolga tidak memiliki kewenangan untuk membatasi?	Polres sibolga tidak ada kewenangan untuk membatasi hal tersebut

6.	Berkaitan dengan sumber daya, apakah ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya pagu minus anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	faktor lain yang menjadi penyebab terjadi pagu minus yaitu adanya kebijakan baru yang diberlakukan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat pengabdian yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka pagu minus anggaran belanja pegawai
7.	Apakah dampak yang disebabkan adanya kebijakan kenaikan pangkat pengabdian terhadap realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Terjadinya pagu minus
8.	Kenapa minus realisasi anggaran terjadinya pada belanja pegawai Satuan Kerja Polres Sibolga, apakah sebelumnya tidak dianggarkan?	Belanja pegawai yang dianggarkan dihitung dari jumlah personil polres sibolga pada saat penyusunan anggaran
9	Bagaimana cara penyelesaian pagu minus realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Mengajukan revisi DIPA untuk menyelesaikan permasalahan pagu minus DIPA sesuai ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran
10.	Apakah dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya pagu minus realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Dampak yang ditimbulkan tidak ada

SIBOLGA, 25 NOVEMBER 2020  
 NARASUMBER

  
HEDI SYAIFUTRA HASIBUAN  
 BRIGADIR POLISI NRP 88090535

---

**Identitas Informan III**

Nama : Dewi Khairani, S.H.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal Lahir : Pasar x, 01 Oktober 1996  
Umur : 24 Tahun  
Pendidikan Terakhir Umum : Strata 1  
Pendidikan Terakhir Kepolisian : Diktuk  
Alamat : Dusun I desa pasar x Kec. Kutalimbaru  
Kab. Deli Serdang  
Jabatan : Brigadir Bagren

---

**Jadwal Wawancara**

Hari/Tanggal : Kamis, 26 November 2020  
Waktu : 10.00 Wib  
Tempat : Jalan Dr. F. L. Tobing No. 35  
Tujuan : Isi Riset Penelitian Tesis

---

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang LRA Satuan Kerja Polres Sibolga?	Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
2.	Apakah Anda mengetahui tentang permasalahan pagu minus yang terjadi dalam relaisasi anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga pada periode 5 (lima) tahun terakhir?	Ada minus pada belanja pegawai
3.	Apakah terdapat aturan khusus yang mengatur tentang penyusunan LRA sebagai wujud akuntabilitas keuangan yang diterapkan pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang penyusunan LRA
4.	Bagaimana alur dan tata cara pelaksanaan LRA pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	SPM/ SP2D dihimpun dan dilakukan penginputan pada aplikasi SIMAP Offline (sistem manajemen anggran polri)
5.	Apakah self blocking oleh Mabes Polri selalu terjadi pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	tidak
6.	Apakah besaran <i>Self Blocking</i> yang dilakukan oleh Mabes	tidak

	Polri selalu sama untuk setiap tahun anggaran pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	
7.	Apakah dampak yang disebabkan adanya kebijakan kenaikan pangkat pengabdian terhadap realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Terjadinya pagu minus belanja pegawai
8.	Kenapa minus realisasi anggaran terjadinya pada belanja pegawai Satuan Kerja Polres Sibolga, apakah sebelumnya tidak dianggarkan?	Anggaran pada Polres Sibolga khusus belanja pegawai dianggarkan namun karena dinamika pegawai yang menyebabkan minus belanja pegawai
9	Bagaimana cara penyelesaian pagu minus realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	Mengajukan revisi DIPA untuk menyelesaikan permasalahan pagu minus DIPA sesuai ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran
10.	Apakah dampak yang ditimbulkan akibat dari terjadinya pagu minus realisasi anggaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Polres Sibolga?	<i>terjadinya</i> penurunan volume keluaran (output) teknis non teknis

SIBOLGA, 26 NOVEMBER 2020  
NARASUMBER



DEWI KHAIRANI, SH  
BRIGADIR POLISI SATU NRP 96100005



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA T.A 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	37.207.000	37.206.960	100	40
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	3.000	474	15,8	2.526
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	3.544.000	3.543.520	99,99	480
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2.608.000	2.607.120	99,97	880
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	7.920.000	4.110.000	51,89	3.810.000
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	3.601.000	3.600.000	99,97	1.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>54.883.000</b>	<b>51.068.074</b>	<b>93,05</b>	<b>3.814.926</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	8.328.919.000	8.855.394.550	106,32	-526.475.550
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	178.000	162.488	91,29	15.512
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	574.481.000	574.966.355	100,08	-485.355
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	183.129.000	183.323.008	100,11	-194.008
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	519.091.000	519.580.000	100,09	-489.000
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	229.750.000	229.749.717	100	283
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	681.328.000	682.152.948	100,12	-824.948
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	4.217.051.000	4.221.700.000	100,11	-4.649.000
	Belanja Tunj. Kowar/Polwan TNI TNI/POLRI	9.301.000	9.300.000	99,99	1.000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	18.701.000	18.700.000	99,99	1.000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	0		0
	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI	0	0		0
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	152.251.000	152.400.000	100,1	-149.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112</b>	<b>14.914.180.000</b>	<b>15.447.429.066</b>	<b>103,58</b>	<b>-533.249.066</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>14.969.063.000</b>	<b>15.498.497.140</b>	<b>103,54</b>	<b>-529.434.140</b>
52	BELANJA BARANG				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran (ATK SKCK Polres & Polsek)	11.700.000	8.704.000	100	2.996.000
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	480.310.000	394.470.000	82,13	85.840.000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	136.280.000	113.170.000	83,04	23.110.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.894.738.000	7.209.823.500	91,32	684.914.500
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>8.523.028.000</b>	<b>7.726.167.500</b>	<b>90,69</b>	<b>796.860.500</b>
	Belanja Barang Non Operasional	7.200.000	7.200.000	100	0
	Belanja Honor Output Kegiatan				
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Barang Persediaan	261.200.000	261.200.000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>261.200.000</b>	<b>261.200.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	127.449.000	114.672.185	89,97	12.776.815
	Belanja Langganan Telepon	13.546.000	13.211.743	97,53	334.257
	Belanja Langganan Air	22.578.000	22.179.300	98,23	398.700
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>163.573.000</b>	<b>150.063.228</b>	<b>91,74</b>	<b>13.509.772</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	327.200.000	326.776.000	99,87	424.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Satpas P1)	521.331.000	521.322.000	100	9.000
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan BMP)	2.185.950.000	2.173.275.620	99,42	12.674.380
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>3.034.481.000</b>	<b>3.021.373.620</b>	<b>99,57</b>	<b>13.107.380</b>
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
	Belanja Perjalanan Biasa	44.556.000	44.500.000	99,87	56.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>44.556.000</b>	<b>44.500.000</b>	<b>99,87</b>	<b>56.000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>12.034.038.000</b>	<b>11.210.504.348</b>	<b>93,18</b>	<b>823.533.652</b>
53	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan laptop, PC dan printer khusus benma)	30.000.000	29.822.727	99,41	177.273
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.822.727</b>	<b>99,41</b>	<b>177.273</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.822.727</b>	<b>99,41</b>	<b>177.273</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27.033.101.000</b>	<b>26.738.824.215</b>	<b>98,91</b>	<b>294.276.785</b>

Uang makan Non Orzantik Polres 18.040.000  
Makan dan Wat Tahanan Polres 34.920.000  
makan dan Wat Tahanan Polsek 32.880.000  
Honor Petugas Pelaksana SIM 15.000.000  
Honor petugas pelaksana SAMSAT 5.000.000  
Honor Petugas Tilang 3.110.000  
Pengadaan makan Pendidikan dan Pelat 50.096.000  
Duk penggalangan tingkat Polres 132.788.000  
FGD Sat Binmas 8.000  
Yanmas Polsek 216.000  
Giat Bulan Tertib Lalu Lintas Polres & I 708.000  
Lidik sidik Sat Pol Air 50.120.500  
Tipikor 30.000.000  
Turjawali Lantas dan Giat Lidik laka lar 10.353.000  
Pam Obvit 410.625.000

SIBOLGA, 31 DESEMBER 2016  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

KHAMDANI, S.Ag., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 70060161

OPERATOR BAGREN

HEDI SYAHPUTRA HASIBUAN  
BRIGADIR POLISI NRP 88090535

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA T.A 2017

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	31.469.000	31.468.960	100	40
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	3.000	613	20,43	2.387
511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	2.919.000	2.918.456	99,98	544
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	412.000	411.192	99,8	808
511176	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2.318.000	2.317.440	99,98	560
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	11.500.000	10.560.000	91,83	940.000
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	0		0
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2.340.000	2.340.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	50.961.000	50.016.661	98,15	944.339
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	7.820.250.000	8.429.875.250	107,82	-609.625.250
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	156.000	169.572	108,71	-13.572
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	484.625.000	526.579.597	108,7	-41.954.597
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	158.643.000	172.411.416	108,73	-13.768.416
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	427.190.000	482.010.000	112,83	-54.820.000
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	46.007.000	47.483.513	103,21	-1.476.513
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	587.109.000	641.858.460	109,38	-54.749.460
511228	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	3.675.366.000	4.021.950.000	109,47	-346.584.000
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	9.700.000	10.600.000	109,28	-900.000
511233	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	37.800.000	34.700.000	91,8	3.100.000
511236	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	13.720.000	0	0	13.720.000
511242	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka TNI/POLRI	0	0		0
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	135.750.000	147.300.000	108,56	-11.550.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112	13.396.316.000	14.514.937.808	108,38	-1.118.621.808
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13.447.277.000	14.564.954.469	108,34	-1.117.677.469
52	BELANJA BARANG				
5211	Belanja Barang Operasional				
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	19.000.000	19.000.000	100	0
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Uang makan Non Organik Polres dan Polsek)	352.940.000	351.646.000	99,63	1.294.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113.320.000	113.320.000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	7.347.726.000	7.194.956.000	97,92	152.770.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	7.832.986.000	7.678.922.000	98,03	154.064.000
5212	Belanja Barang Non Operasional (Honor Supveyor data Komplapin)				
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19.800.000	14.400.000	72,73	5.400.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	19.800.000	14.400.000	72,73	5.400.000
5218	Belanja Barang Persediaan				
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	261.200.000	261.200.000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	261.200.000	261.200.000	100	0
5221	Belanja Jasa				
522111	Belanja Langganan Listrik	195.110.000	193.788.427	99,32	1.321.573
522112	Belanja Langganan Telepon	13.546.000	13.462.944	99,39	83.056
522113	Belanja Langganan Air	22.578.000	21.641.570	95,85	936.430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	231.234.000	228.892.941	98,99	2.341.059
5231	Belanja Pemeliharaan				
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	245.200.000	245.200.000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	426.009.000	426.009.000	100	0
523122	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan	0	0		0
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan BMP Polres/Polsek /Pol Air)	2.344.768.000	2.339.402.000	99,77	5.366.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3.015.977.000	3.010.611.000	99,82	5.366.000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
524111	Belanja Perjalanan Biasa	242.295.000	242.285.000	100	10.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	242.295.000	242.285.000	100	10.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11.603.492.000	11.436.310.941	98,56	167.181.059
53	BELANJA MODAL				
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Scanner Dit Intelkam)	37.864.000	37.720.227	99,62	143.773
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	37.864.000	37.720.227	99,62	143.773
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Renovasi Gedung dan bangunan)	192.319.000	188.430.000	97,98	3.889.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	192.319.000	188.430.000	97,98	3.889.000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	230.183.000	226.150.227	98,25	4.032.773
	JUMLAH BELANJA	25.280.952.000	26.227.415.637	103,76	-946.463.637

→ QW Radikal Sat Intelkam 788.000  
OW Radikal Sar Reskrim 12.710.000  
Bintibmas Polsek S. Selatan 1.920.000  
Yanmas Polsek S. Selatan 27.000  
Pam Obvitt Sat Sabhara 137.325.000  
152.770.000

SIBOLGA, 31 DESEMBER 2017  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

  
SUC AFANDI  
KOMISARIS POLISI NRP 66060476


OPERATOR BAGREN

  
HEDI YAHRUYRA HASIBUAN  
BRIGADIR POLISI NRP 66090535

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA T.A 2018

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	32.198.000	32.197.600	100	400
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	3.000	864	28,8	2.136
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	3.220.000	3.219.760	99,99	240
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	562.000	552.576	98,32	9.424
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2.463.000	2.462.280	99,97	720
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	8.470.000	8.470.000	100	0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2.520.000	2.520.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>49.436.000</b>	<b>49.423.080</b>	<b>99,97</b>	<b>12.920</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	7.940.135.000	7.936.840.600	99,99	3.294.400
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	200.000	157.323	78,76	42.677
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	527.762.000	527.761.780	100	220
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	165.972.000	165.970.622	100	1.378
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	473.010.000	473.010.000	100	0
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	83.487.000	83.485.933	100	1.067
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	596.423.000	596.291.796	100	131.204
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	4.562.780.000	4.560.920.000	100	1.860.000
	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	10.052.000	10.050.000	99,98	2.000
	Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	20.402.000	20.400.000	99,99	2.000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	3.000	0	0	3.000
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	151.950.000	151.875.000	100	75.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112</b>	<b>14.532.176.000</b>	<b>14.526.763.054</b>	<b>100</b>	<b>5.412.946</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>14.581.612.000</b>	<b>14.576.186.134</b>	<b>100</b>	<b>5.425.866</b>
52	BELANJA BARANG				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran	11.000.000	11.000.000	100	0
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Makan & Wat Tahanan)	347.890.000	347.880.000	100	10.000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	97.760.000	97.760.000	100	0
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Giat Lidik laka Sat Lantas )	8.365.226.000	8.364.890.000	100	336.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>8.821.876.000</b>	<b>8.821.530.000</b>	<b>100</b>	<b>346.000</b>
	Belanja Barang Non Operasional Belanja Honor Output Kegiatan	14.400.000	14.400.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Barang Persediaan				
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	333.972.000	333.972.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>333.972.000</b>	<b>333.972.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	397.310.000	396.219.000	100	1.091.000
	Belanja Langganan Telepon	14.036.000	14.036.000	100	0
	Belanja Langganan Air	52.578.000	52.575.195	99,99	2.805
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>463.924.000</b>	<b>462.831.009</b>	<b>99,76</b>	<b>1.092.991</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156.000,000	156.000,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	650,631,000	650,631,000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,593,039,000	2,593,039,000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>3.399.670.000</b>	<b>3.399.670.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa	242.295.000	242.060.000	99,9	235.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>242.295.000</b>	<b>242.060.000</b>	<b>99,9</b>	<b>235.000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>13.276.137.000</b>	<b>13.274.463.009</b>	<b>99,99</b>	<b>1.673.991</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27.857.749.000</b>	<b>27.850.649.143</b>	<b>99,99</b>	<b>7.099.857</b>

SIBOLGA, 31 DESEMBER 2018  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

  
SUCI AFANDI  
KOMISARIS POLISI NRP 66060476

OPERATOR BAGREN

  
HEDI SYAHPUTRA HASIBUAN  
BRIGADIR POLISI NRP 88090535



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA T.A 2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA	% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
51	BELANJA PEGAWAI				
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS				
	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	35.580.000	35.579.700	100	300
	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	2.000	221	16,55	1.779
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	3.559.000	3.557.970	99,97	1.030
	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	564.000	563.148	99,85	852
	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2.390.000	2.389.860	99,99	140
	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	8.330.000	8.330.000	100	0
	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2.520.000	2.520.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>52.945.000</b>	<b>52.940.899</b>	<b>99,99</b>	<b>4.101</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri				
	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	8.154.709.000	8.154.708.700	100	300
	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	144.000	123.321	99,76	20.679
	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	537.942.000	537.940.570	100	1.430
	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	172.999.000	172.998.538	100	462
	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	483.090.000	483.090.000	100	0
	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	69.406.000	69.405.125	100	875
	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	582.590.000	582.589.932	100	68
	Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	4.438.080.000	4.438.080.000	100	0
	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	8.501.000	8.500.000	99,99	1.000
	Belanja Tunj. Babinkamtibas TNI/POLRI	20.101.000	20.100.000	100	1.000
	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	2.000	0	0	2.000
	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	145.650.000	145.650.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5112</b>	<b>14.613.214.000</b>	<b>14.613.186.186</b>	<b>100</b>	<b>27.814</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>14.666.159.000</b>	<b>14.666.127.085</b>	<b>100</b>	<b>31.915</b>
52	BELANJA BARANG				
	Belanja Barang Operasional				
	Belanja Keperluan Perkantoran	0	0		0
	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	370.410.000	370.410.000	100	0
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	138.320.000	134.600.000	97,31	3.720.000
	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.360.002.000	10.351.883.000	99,92	8.119.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>10.868.732.000</b>	<b>10.856.893.000</b>	<b>99,89</b>	<b>11.839.000</b>
	Belanja Barang Non Operasional	14.400.000	14.400.000	100	0
	Belanja Honor Output Kegiatan				
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>14.400.000</b>	<b>14.400.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Barang Persediaan	289.240.000	289.240.000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>289.240.000</b>	<b>289.240.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	Belanja Jasa				
	Belanja Langganan Listrik	406.110.000	406.109.374	100	626
	Belanja Langganan Telepon	20.386.000	20.386.000	100	0
	Belanja Langganan Air	52.578.000	52.578.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>479.074.000</b>	<b>479.073.374</b>	<b>100</b>	<b>626</b>
	Belanja Pemeliharaan				
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.200.000	147.200.000	100	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	660.901.000	660.901.000	100	0
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Pengadaan BMP)	2.383.039.000	2.387.867.000	99,78	5.172.000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>3.201.140.000</b>	<b>3.195.968.000</b>	<b>99,84</b>	<b>5.172.000</b>
	Belanja Perjalanan Dalam Negeri				
	Belanja Perjalanan Biasa	242.295.000	242.295.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>242.295.000</b>	<b>242.295.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>15.094.881.000</b>	<b>15.077.869.374</b>	<b>99,89</b>	<b>17.011.626</b>
53	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.199.000	8.199.000	100	0
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>8.199.000</b>	<b>8.199.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53</b>	<b>8.199.000</b>	<b>8.199.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>29.769.239.000</b>	<b>29.752.195.459</b>	<b>99,94</b>	<b>17.043.541</b>

Honor PBP STNK dan PBP TNKB 3.720.000  
 Duk Ons Be Ons 60.000  
 Turjawali Sat Pol Air 70.000  
 Tipikor 8.000.000

SIBOLGA, 31 DESEMBER 2019  
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN

  
 KAMALUDDIN ABABAN, SH  
 KOMISARIS POLISI NRP 6660476

OPERATOR BAGREN

  
 HEDI SYAHPUTRA HASIBUAN  
 BRIGADIR POLISI NRP 88090535

No. Dokumen : 0000  
Tanggal : 31/12/2015  
Revisi : 0  
Ringkasan : 1/2

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ESELON I : 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA  
SATUAN KERJA : 669233 POLRES SIBOLGA  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	963,135,736	963,135,736	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	963,135,736	963,135,736	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>0</b>	<b>963,135,736</b>	<b>963,135,736</b>	<b>0.00</b>
B	<b>BELANJA</b>				
	Belanja Pegawai	10,230,526,000	14,634,354,883	4,403,828,883	143.05
	Belanja Barang	7,631,191,000	7,515,313,000	( 115,878,000)	98.48
	Belanja Modal	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>17,861,717,000</b>	<b>22,149,667,883</b>	<b>4,287,950,883</b>	<b>124.01</b>
C	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

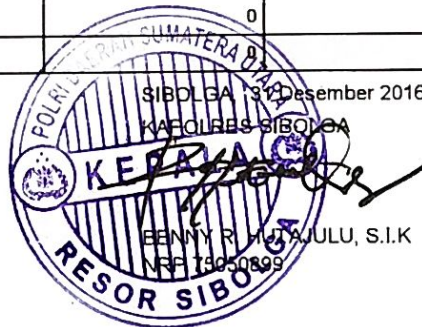


No. Surat : 0000  
Tanggal : 31/12/2016  
Halaman : 1  
Page : 1/1

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ESELON I : 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA  
SATUAN KERJA : 669233 POLRES SIBOLGA  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	455,793,750	869,485,338	413,691,588	190.76
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	455,793,750	869,485,338	413,691,588	190.76
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>455,793,750</b>	<b>869,485,338</b>	<b>413,691,588</b>	<b>190.76</b>
B	<b>BELANJA</b>				
	Belanja Pegawai	14,969,063,000	15,498,497,140	529,434,140	103.54
	Belanja Barang	12,034,038,000	11,210,504,348	( 823,533,652)	93.16
	Belanja Modal	30,000,000	29,822,727	( 177,273)	99.41
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27,033,101,000</b>	<b>26,738,824,215</b>	<b>( 294,276,785)</b>	<b>98.91</b>
C	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



Kasus : 1000000000  
Lampiran : 1000000000  
Halaman : 1  
Program : 1000000000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ESELON I : 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA  
SATUAN KERJA : 669233 POLRES SIBOLGA  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	410,625,000	2,412,014,186	2,001,389,186	587.40
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	410,625,000	2,412,014,186	2,001,389,186	587.40
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>410,625,000</b>	<b>2,412,014,186</b>	<b>2,001,389,186</b>	<b>587.40</b>
B	<b>BELANJA</b>				
	Belanja Pegawai	13,447,277,000	14,564,954,469	1,117,677,469	108.31
	Belanja Barang	11,603,492,000	11,436,310,941	( 167,181,059)	98.56
	Belanja Modal	230,183,000	226,150,227	( 4,032,773)	98.25
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-Lain	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25,280,952,000</b>	<b>26,227,415,637</b>	<b>946,463,637</b>	<b>103.74</b>
C	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



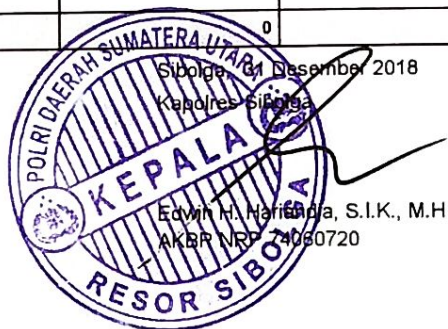


Waktu : 10:05  
Tanggal : 14/01/19  
Makalah : ...  
Pang. In : ...

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 ESELON I : 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA  
 SATUAN KERJA : 669233 POLRES SIBOLGA  
 JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	184,320,000	2,480,155,256	2,295,835,256	1345.57
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	184,320,000	2,480,155,256	2,295,835,256	1345.57
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>184,320,000</b>	<b>2,480,155,256</b>	<b>2,295,835,256</b>	<b>1345.57</b>
B	<b>BELANJA</b>				
	Belanja Pegawai	14,581,612,000	14,576,186,134	( 5,425,866)	99.96
	Belanja Barang	13,276,137,000	13,274,463,009	( 1,673,991)	99.99
	Belanja Modal	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>27,857,749,000</b>	<b>27,850,649,143</b>	<b>( 7,099,857)</b>	<b>99.97</b>
C	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Sibolga, 31 Desember 2018  
 Kepala  
  
 Edwin H. Marinda, S.I.K., M.H  
 AKBR NRP 74060720

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019  
(DALAM RUPIAH)**

Kategori : 2019  
Tahun : 2019  
Halaman : 1  
Tanggal : 12/01/2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
ESELON I : 01 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA  
SATUAN KERJA : 669233 POLRES SIBOLGA  
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISAS ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	192,000,000	2,458,899,192	2,266,899,192	1280.68
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	192,000,000	2,458,899,192	2,266,899,192	1280.68
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>192,000,000</b>	<b>2,458,899,192</b>	<b>2,266,899,192</b>	<b>1280.68</b>
B	<b>BELANJA</b>				
	Belanja Pegawai	14,666,159,000	14,666,127,085	( 31,915)	100.00
	Belanja Barang	15,094,881,000	15,077,869,374	( 17,011,626)	99.89
	Belanja Modal	8,199,000	8,199,000	0	100.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>29,769,239,000</b>	<b>29,752,195,459</b>	<b>( 17,043,541)</b>	<b>99.94</b>
C	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>



Sibolga, 31 Desember 2019  
KAPOLRES SIBOLGA

TRİYAD, S.H., S.I.K.  
AKBF NRP. 73081569